

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
SDIT BINA INSANI MESUJI**

(SKRIPSI)

Oleh

ALIFFIA HANIF ARIYANI

2053053011



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR SDIT BINA INSANI MESUJI

Oleh

ALIFFIA HANIF ARIYANI

Pelaksanaan kurikulum merdeka belajar di SDIT Bina Insani masih dilakukan secara bertahap, hal ini berakibat pada proses implementasi manajemen kurikulum merdeka karena adanya perbedaan dalam menerima perubahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar di SDIT Bina Insani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar di SD IT Bina Insani terdiri dari 1) Perencanaan kurikulum dilakukan dengan partisipasi berbagai pihak dan telah menyusun perangkat pembelajaran. Selain itu dalam perencanaan, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan telah dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip merdeka belajar, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik 2) Pengorganisasian kurikulum dilakukan melalui penyusunan jadwal pembelajaran, penentuan tugas dan penyusunan kriteria kerja yang dilakukan melalui rapat koordinasi. 3) Pelaksanaan kurikulum merdeka dilakukan dengan baik berkat kerjasama harmonis antar personil dan kepemimpinan yang efektif dari kepala sekolah. Penerapan kurikulum merdeka sudah dilakukan dengan standar proses kurikulum merdeka dan diikuti dengan program sekolah yang menerapkan nilai-nilai literasi dalam pembiasaan sehari-hari. 4) Pengawasan kurikulum dilakukan dengan baik oleh kepala sekolah yang dilakukan secara teratur dan berkala baik secara langsung atau melalui kegiatan supervisi yang dilakukan. Minimal 2 kali dalam satu tahun, Berdasarkan hasil penelitian terkait manajemen SDIT Bina Insani berada pada tahap pengembangan dan penyempurnaan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar.

Kata Kunci : Fungsi, Implementasi, Manajemen, Kurikulum Merdeka Belajar.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INDEPENDENT LEARNING CURRICULUM MANAGEMENT SDIT BINA INSANI MESUJI

By

ALIFFIA HANIF ARIYANI

Implementation of the independent curriculum of learning at SDIT Human Construction is still being progressively carried out, this has resulted in the process of implementation of independent management of curricula due to differences in acceptance of such changes. This research aims to describe the implementation of independent management curriculum learning in Human Building IT SD. This research uses qualitative methods with the type of case study research. Data collection techniques are observations, interviews and documentation. The result of this research is the implementation of the management of the independent learning curriculum in SD Human Building IT which consists of 1) The curricular planning is carried out with the participation of various parties and has compiled learning tools. In addition, in the planning, the Operational Curriculum of the Education Unit has been designed with reference to the principles of independent learning, and has been adapted to the needs of the pupils 2) The organization of the curricula is done through the preparation of learning schedules, the determination of tasks and the formulation of working criteria carried on through coordination meetings. 3) Implementation of an independent curriculum is done well thanks to harmonious cooperation between staff and effective leadership of the head of the school. Implements of an independent Curriculum has been done with the standard of independent course process and followed by a school program that applies literacy values in everyday practice. 4) Curricular supervision is performed either by the head of school regularly and periodically either directly or through supervisory activities carried out. At least 2 times a year, based on the results of the research, the Ministry of IT Construction Humanities is at the stage of development and perfection in the application of the independent curriculum of learning.

Keywords: Functions, Implementation, Management, Free Learning Curriculum.

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
SDIT BINA INSANI MESUJI**

Oleh

ALIFFIA HANIF ARIYANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Jurusan Ilmu Pendidikan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
SDIT BINA INSANI MESUJI**

Nama Mahasiswa : **Aliffia Hanif Ariyani**

No. Pokok Mahasiswa : **2053053011**

Program Studi : **S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar**

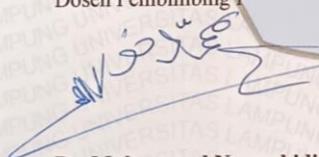
Jurusan : **Ilmu Pendidikan**

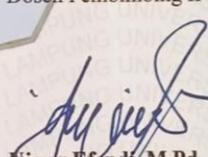
Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



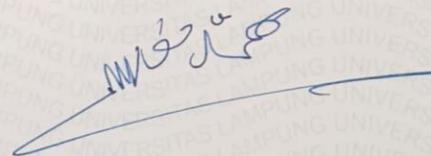
Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag, M.Si.
NIP 19741220 200912 1 002


Ujang Efendi, M.Pd., I.
NIK 2314 0784 0820101

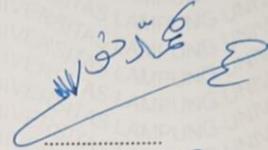
2. Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan


Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag, M.Si.
NIP 19741220 200912 1 002

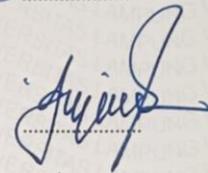
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

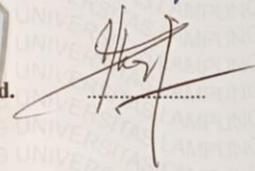
Ketua : **Dr. Muhammad Nurwahidin,**
M.Ag, M.Si



Sekretaris : **Ujang Efendi, M.Pd., I.**



Penguji Utama : **Drs. Maman Surahman, M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Mei 2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliffia Hanif Ariyani
NPM : 2053053011
Program Studi : S1 PGSD
Jurusan : Ilmu Pendidikan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar SDIT Bina Insani Mesuji” tersebut adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Aliffia Hanif Ariyani
NPM. 2053053011

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Aliffia Hanif Ariyani. Lahir di Sragen, Jawa Tengah pada tanggal 07 Mei 2001. Peneliti merupakan putri pertama dari tiga bersaudara. dari pasangan Bapak Ngabdul Riyanto dan Ibu Marsini.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. SD Negeri Kalimacan, Sragen diselesaikan pada tahun 2013
2. SMP Negeri 1 Kalijambe, Sragen diselesaikan pada tahun 2016
3. SMAS Al-Islam 1 Surakarta, Surakarta diselesaikan pada tahun 2019

Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN pada tahun 2020. Pada tahun 2023 peneliti melaksanakan Program Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLP) di SD Negeri 1 Bengkulu Raman, serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bengkulu Raman Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif pada organisasi Pramuka FKIP dan pernah mengemban amanah menjadi bendahara umum pada periode 2022.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

Q.S. Al-Insyirah : 6-8

Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang
yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan
yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan
yang benar pada langkah yang kedua.

-Buya Hamka -

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Serta tak lupa Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Alhamdulillahirabbil'amin, sujud syukur kepada sang Maha Kuasa, dengan segala kerendahan hatiku, kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Bapak Ngabdul Riyanto dan Ibu Marsini

Yang selalu senantiasa memanjatkan doa-doa untukku sehingga perjalanan ini terasa lebih mudah. Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dan segala perjuangan yang tak terhitung demi kehidupan dan cita-citaku, meskipun tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun mampu mengantarkanku hingga pendidikan sarjana ini, serta selalu memberikan motivasi dan semangat agar aku dapat mencapai cita-cita.

Terima kasih Bapak

Terima kasih Ibu

Kedua Adikku, Salsabila Khoirunnida dan Berliana Anindya Fauziah yang selalu kebersamai, mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar SD IT Bina Insani ”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Jurusan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung.

Peneliti menyadari sepenuhnya atas keterbatasan pengetahuan serta kemampuan, namun dengan adanya dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, kepada Bapak Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing 1 atas kesediaannya memberikan bimbingan, motivasi, ilmu pengetahuan, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini. Kepada Bapak Ujang Efendi, M.Pd. I. selaku dosen pembimbing 2 atas kesediaannya memberikan bimbingan, motivasi, ilmu pengetahuan, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini. Serta kepada Bapak Drs. Maman Surahman, M.Pd. selaku dosen pembahas atas kesediaannya memberikan bimbingan, motivasi, ilmu pengetahuan, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung yang telah telah memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi.
2. Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung yang telah membantu mengesahkan

skripsi ini

3. Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang menyetujui skripsi ini dan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini
4. Prof. Dr. Sowiyah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang telah membantu memfasilitasi administrasi serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan S1 PGSD yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu kebutuhan surat menyurat yang diperlukan dalam skripsi ini.
6. Kepala SDIT Bina Insani, Mesuji, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Pendidik dan tenaga kependidikan, staf serta peserta didik SDIT Bina Insani, Mesuji, yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian skripsi ini.
8. Seseorang yang telah memberikan dukungan, membantu dalam segala hal, menemani setiap langkah penulis, serta mendengarkan keluh kesah dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih.
9. Teman-teman seperjuangan kontrakan mawar putih terima kasih telah membersamai selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan PGSD kelas A dan angkatan 2020 yang telah membersamai perjuangan dalam proses mencapai cita-cita
11. Semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Metro, 25 Maret 2024

Peneliti

Aliffia Hanif Ariyani

NPM 2053053011

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus Penelitian.....	6
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Definisi Istilah.....	7
II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Manajemen Kurikulum.....	9
2.1.1. Pengertian Manajemen.....	9
2.1.2. Pengertian Kurikulum.....	10
2.1.3. Pengertian Manajemen Kurikulum.....	11
2.1.4. Fungsi Manajemen Kurikulum.....	12
2.2. Perkembangan Kebijakan Kurikulum di Indonesia.....	17
2.2.1. Kebijakan Kurikulum Pra Kemerdekaan.....	18
2.2.2. Kebijakan Kurikulum Pasca Kemerdekaan.....	18
2.2.3. Kebijakan Kurikulum Masa Reformasi.....	19
2.2.4. Kebijakan Merdeka Belajar.....	20
2.3. Evaluasi Kurikulum.....	21
2.3.1. Evaluasi Kurikulum 2013.....	21
2.3.2. Evaluasi Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus (Kurikulum Darurat).....	24
2.4. Kurikulum Merdeka Belajar.....	27
2.4.1. Konsep Kurikulum Merdeka Belajar.....	27
2.4.2. Tujuan Kurikulum Merdeka Belajar.....	30
2.4.3. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.....	31
2.5. Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar.....	33
2.5.1. Proyek Penguatan Profil Pancasila.....	33
2.5.2. Struktur Kurikulum Merdeka Belajar di SD.....	34
2.5.3. Perangkat Ajar.....	35

2.6. Penelitian Relevan.....	37
2.7. Kerangka Berpikir Penelitian.....	40

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Rancangan Penelitian.....	42
3.1.1. Pendekatan Penelitian	42
3.1.2. Rancangan Penelitian	43
3.2. Setting Penelitian	43
3.2.1. Tempat Penelitian.....	43
3.2.2. Waktu Penelitian	43
3.3. Kehadiran Peneliti	43
3.4. Sumber Data Penelitian.....	44
3.4.1. Data Primer	44
3.4.2. Data Sekunder	44
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5.1. Wawancara.....	46
3.5.2. Observasi.....	47
3.5.3. Dokumentasi	48
3.6. Teknik Analisis Data.....	48
3.6.1. Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>)	49
3.6.2. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	49
3.6.3. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	49
3.6.4. Penarikan Kesimpulan (<i>Verification</i>)	49
3.7. Keabsahan Data.....	50
3.7.1. <i>Uji Credibility</i>	50
3.7.2. <i>Uji Transferability</i>	51
3.7.3. <i>Uji Dependability</i>	51
3.7.4. <i>Uji Confirmability</i>	52
3.8. Tahapan Penelitian	52
3.8.1. Tahap Pra Lapangan.....	52
3.8.2. Tahap Lapangan	53
3.8.3. Tahap Analisis Data	53
3.8.4. Tahap Pelaporan	53

IV. PAPARAN DATA, TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data	54
4.1.1. Deskripsi Penelitian.....	54
4.1.2. Paparan Data Hasil Penelitian	62
4.2. Temuan Penelitian.....	87
4.3. Pembahasan.....	95

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	106
5.2. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Gerakan Merdeka Belajar	28
2. Dimensi dan Elemen Profil Pelajar Pancasila.....	34
3. Jumlah Informan Penelitian	44
4. Pengkodean Informan Penelitian	45
5. Kisi-kisi metode wawancara	47
6. Data Pendidik dan Tenaga Pendidik SDIT Bina Insani	56
7. Data Peserta Didik SDIT Bina Insani Tahun Ajaran 2023/2024	57
8. Struktur Kurikulum Merdeka dan Kekhasan SDIT Bina Insani Mesuji Kelas I Tahun Pelajaran 2023/2024	58
9. Struktur Kurikulum Merdeka dan Kekhasan SDIT Bina Insani Mesuji Kelas II Tahun Pelajaran 2023/2024.....	59
10. Struktur Kurikulum Merdeka dan Kekhasan SDIT Bina Insani Mesuji Kelas III, IV dan V Tahun Pelajaran 2023/2024.....	60
11. Struktur Kurikulum 2013 dan Kekhasan SDIT Bina Insani Mesuji Kelas VI.....	61
12. Keadaan Sarana dan Prasarana SD IT Bina Insani	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pikir.....	41
2. Model Analisis Interaktif	49
3. Jadwal pelaksanaan P5	72
4. Jadwal pembelajaran kurikulum merdeka kelas 1	73
5. Jadwal pelaksanaan P5	73
6. Jenis kegiatan ekstrakurikuler	74
7. Jadwal pelaksanaan pelatihan kurikulum merdeka	75
8. Pelaksanaan komunitas belajar	79
9. Diskusi bersama Dinas lingkungan hidup.....	81
10. Sosialisasi P5.....	82
11. Produk hasil daur ulang sampah organik	83
12. Produk hasil daur ulang sampah non organik	83
13. Proses pembelajaran di kelas	84
14. Wawancara dengan kepala sekolah.....	181
15. Wawancara dengan waka kurikulum	181
16. Wawancara dengan pendidik kelas II	181
17. Wawancara dengan pendidik kelas IV	182
18. Halaman dan Gedung SDIT Bina Insani.....	182
19. Proses pembelajaran di luar kelas	182
20. Proses pembelajaran di dalam kelas.....	183
21. Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka	183
22. Kegiatan workshop terkait kurikulum merdeka.....	183

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian Pendahuluan	117
2. Surat Balasan Sekolah.....	118
3. Surat Izin Penelitian	119
4. Surat Balasan Izin Penelitian	119
5. Surat Validasi Instrumen.....	121
6. Kisi-kisi wawancara tentang implementasi manajemen kurikulum merdeka SDIT Bina Insani Mesuji.....	122
7. Lembar wawancara tentang implementasi manajemen kurikulum merdeka SDIT Bina Insani Mesuji	124
8. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah	130
9. Transkrip Wawancara Waka Kurikulum	140
10. Transkrip Wawancara Pendidik 1	149
11. Transkrip Wawancara Pendidik 2	158
12. Dokumen	167
13. Dokumentasi Wawancara.....	181

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini salah satunya adalah sering terjadinya pergantian kurikulum. Menurut Ulinniam et al. (2021: 118-126) implementasi kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan yaitu pada tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional mengganti menjadi kurikulum 2013 (Kurtilas) dan pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi Kurtilas Revisi.

Kurikulum adalah bagian penting dari institusi pendidikan formal, yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan isi pembelajaran, mengarahkan proses pendidikan, tolak ukur keberhasilan, dan kualitas pendidikan.

Menurut Fathurrochman (2017 : 85). Kurikulum seringkali tidak mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga pengembangan dan pembenahan kurikulum harus dilakukan secara berkesinambungan. Kekuasaan dan perangkat lainnya selalu berkontribusi pada perubahan kurikulum di Indonesia. Hal tersebut berakibat pada arah dan tujuan kurikulum hanya ditentukan oleh keputusan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan di tingkat nasional maupun subsistem non-nasional, atau oleh aliran kepentingannya dalam bidang pendidikan. Menurut Pora (2007) kajian atas kurikulum lambat laun akan menjadi jenuh serta kehilangan relevansi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Permasalahan ini dibuktikan dengan adanya data hasil survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) menunjukkan bahwa 70% peserta didik berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID 19. Selain itu menurut Donnelly & Patrinos (2021:1-9) pendidikan di Indonesia pasca pandemi mengalami kondisi menurunnya semangat mendidik (*teaching loss*) yang berakibat pada kehilangan pengetahuan dan keterampilan (*learning loss*) dan penurunan kualitas karakter (*character loss*) pada peserta didik. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikbud (2023: 25) melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat) untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) pada masa pademi. Hasilnya, dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan, penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% (literasi) dan 86% (numerasi).

Hasim (2020) mengatakan bahwa “Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan satu langkah kebijakan pendidikan yang dirasa cocok untuk diterapkan pada situasi saat ini, yang sering dikenal dengan Kurikulum Merdeka Belajar”. Lahirnya kebijakan kurikulum merdeka belajar dilandasi oleh beberapa hal, yang pertama kebijakan Ujian Nasional (UN) berdasarkan analisis hasil studi *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang menunjukkan perlunya pengembangan kemampuan siswa dibidang literasi dan numerasi. Kedua, kebijakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); Ketiga, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan keempat, kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kemendikbud Ristek (2021) dalam mengupayakan pengembangan kemampuan literasi, numerasi serta karakter peserta didik secara berkelanjutan menjadi pemantik munculnya

era baru dalam sistem pendidikan di Indonesia yaitu merdeka belajar. Merdeka belajar adalah proses pendidikan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran yang aktif harus dilakukan agar peserta didik dapat mencapai potensi dirinya dan menjadi literat dalam keagamaan/spiritual, memiliki pengendalian diri, dan memiliki kepercayaan diri, kepribadian, kecerdasan, moral, dan kemampuan peserta didik dalam memberikan pendidikan kembali kepada garis besarnya. Menurut Bahar, dkk (2020), literasi pendidikan selalu mempersilakan rasa ingin tahu, terjadi komunikasi dialogis, ada ruang kreativitas; mampu berkolaborasi untuk untuk mencapai kepercayaan diri.

Salah satu program yang dipaparkan oleh Kemendikbud dalam peluncuran merdeka belajar ialah dimulainya program sekolah penggerak. Program sekolah ini bertujuan untuk membantu setiap lembaga pendidikan menghasilkan generasi yang memiliki kepribadian profil pelajar Pancasila. Hal tersebut akan berhasil jika terdapat peran seorang pendidik. Menurut Ainia (2020: 95-101), pendidik sebagai subjek utama yang berperan diharapkan mampu menjadi penggerak untuk mengambil tindakan yang memberikan hal-hal positif kepada peserta didik. Peran pendidik sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam capaian tujuan pembelajaran dari inovasi kurikulum tersebut. Jika pendidik memahami kurikulum dengan benar, maka pelaksanaannya akan lebih mudah.

Menurut Yunus dkk. (2021: 17-26), penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan kurikulum menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan sehingga dalam implementasi kurikulum, fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) sangat diperlukan pada seluruh komponennya. Selain itu diperlukan pula keterlibatan berbagai pihak mulai kepala sekolah, pendidik, orang tua, pemerintah, dan masyarakat supaya kurikulum yang diimplementasikan dapat berjalan secara

efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar yang ditinjau dari fungsi manajemen.

Penelitian yang membahas terkait kurikulum merdeka, wujud merdeka belajar di sekolah dasar belum banyak dilaporkan sebelumnya. Umumnya, banyak penelitian yang dilakukan membahas tentang kurikulum merdeka masih terfokus pada tingkatan perguruan tinggi. Pengimplementasian kurikulum merdeka belajar di sekolah dasar sendiri masih terbatas pada sekolah penggerak saja, seperti yang dilakukan oleh Rahayu dkk., (2022) yang meneliti implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak dengan hasil implementasi kurikulum merdeka sudah dilakukan secara optimal. Selain itu, kepala sekolah dan guru memegang peranan penting dalam melakukan perubahan dalam konteks penerapan kurikulum merdeka. Penelitian lain dilakukan oleh Sumarsih dkk. (2022), terkait implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak di SDN Guruminda 244 Bandung menyatakan hasil penerapan kurikulum merdeka menghasilkan peserta didik yang memiliki 5 karakter profil pelajar pancasila serta membutuhkan peran besar banyak pihak dalam mewujudkan sekolah penggerak dengan mendorong berbagai program yang inovatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 7 November 2023 di SDIT Bina Insani Mesuji yang beralamat di Desa Simpang Pematang, RT 06 RW 04 Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Dimana Bapak Kusmanto S.H., selaku kepala sekolah menjadi informan dalam kegiatan wawancara tersebut, secara umum kepala sekolah menyampaikan bahwa SDIT Bina Insani Mesuji merupakan sekolah penggerak pertama yang berada di kabupaten Mesuji dan sekolah dasar swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan ini dibuat berdasarkan keputusan rapat tahunan yang dilakukan oleh sekolah. Adapun penerapan kurikulumnya SDIT Bina Insani Mesuji sudah menggunakan kurikulum merdeka belajar sejak tahun pertama yaitu tahun 2022. Penerapan kurikulum ini dilakukan secara bertahap yang artinya baru

diterapkan di beberapa kelas dan jenjang pendidikannya yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, di tahun kedua pelaksanaan kurikulum merdeka sudah terdapat 4 kelas yang menerapkan kurikulum merdeka pada pembelajarannya yaitu kelas I, II, IV dan V. Beliau juga menyampaikan, sebenarnya secara konsep kurikulum merdeka lebih mudah dipahami dan lebih bisa mengeksplor kebutuhan peserta didik dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya jika dilihat dari sudut pandang kepala sekolah. Sebagai sekolah penggerak, SDIT Bina Insani Mesuji sudah mengimplementasikan proses pembelajaran dengan kurikulum merdeka dan setiap mata pelajaran menerapkan manajemen pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar apa yang menjadi capaian pembelajaran setiap mata pelajaran terwujud. Selain itu, penerapan manajemen kurikulum merdeka belajar di SDIT Bina Insani Mesuji sudah diterapkan dua tahun berjalan, sekolah sudah mengupayakan dengan maksimal sesuai dengan arahan Kemendikbud.

Perencanaan kurikulum merdeka belajar yang masih dilakukan secara bertahap akan berakibat pada proses implementasi kurikulum merdeka yang kurang efektif karena adanya kendala serta perbedaan dalam menerima adanya perubahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dengan adanya penelitian yang bersifat kualitatif yang menggunakan metode wawancara secara mendalam, observasi (pengamatan), dan dokumentasi peneliti dapat mengetahui keberadaan masalah yang ada dibalik fenomena yang terjadi yakni kurikulum merdeka belajar dan sistematis apa yang diterapkan yang ditinjau melalui manajemen kurikulum dalam menunjang penerapan kurikulum merdeka belajar di SDIT Bina Insani Mesuji. Hal tersebut menjadikan peneliti memfokuskan bidang penelitian yang dikaji mengarah pada implementasi manajemen kurikulum merdeka di SDIT Bina Insani Mesuji dan sistematis penerapan kurikulum merdeka belajar yang sesuai dengan manajemen kurikulum di SDIT Bina Insani Mesuji.

Terkait dengan implementasi manajemen kurikulum di SDIT Bina Insani Mesuji peneliti menganalisis dan mendeskripsikan bagaimanakah manajemen yang dilaksanakan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar di SDIT Bina Insani Mesuji.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Bina Insani Mesuji? ”

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Proses Perencanaan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Bina Insani Mesuji?
2. Bagaimana Pengorganisasian Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Bina Insani Mesuji?
3. Bagaimana Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Bina Insani Mesuji?
4. Bagaimana Pengawasan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Bina Insani Mesuji?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Perencanaan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Bina Insani Mesuji.
2. Pengorganisasian Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Bina Insani Mesuji.
3. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Bina Insani Mesuji.
4. Pengawasan Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Bina Insani Mesuji.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin didapatkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sebagai bahan pelaksanaan manajemen kurikulum merdeka belajar di SDIT Bina Insani Mesuji, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kegiatan penelitian yang semacamnya pada masa yang akan datang.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala Sekolah, sebagai acuan dalam menjalankan peran kepemimpinannya guna mengoptimalkan implementasi manajemen kurikulum dalam program merdeka belajar yang sesuai dengan fungsi manajemen.
- b. Bagi Pendidik, dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan manajemen kurikulum dalam program merdeka belajar didalam kelas.
- c. Bagi Peneliti, hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan peneliti dan dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan pemahaman terkait manajemen kurikulum dalam program merdeka belajar .
- d. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi dalam mendalami atau meneliti ulang terkait implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar.

1.6. Definisi Istilah

1. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan sebuah proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk mempermudah mengelola pendidikan dalam kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran, yang dimulai dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi agar program berjalan dengan terarah dan baik.

3. Merdeka Belajar

Merdeka belajar merupakan program kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang dengan memberi kebebasan kepada sekolah, pendidik dan peserta didik untuk bebas berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif, dimana kebebasan berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Manajemen Kurikulum

2.1.1. Pengertian Manajemen

Menurut Webster's New Collegiate Dictionary dalam Efendi, E., dkk (2023:44-51) disebutkan bahwa manajemen berasal dari kata *to manage* berasal dari bahasa Italia "*maneggio*" dari kata "*maneggiare*" yang diambil dari bahasa Latin, dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. *Manager* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. *Management* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Istilah manajemen sebenarnya mengacu kepada proses pelaksanaan aktivitas yang diselesaikan secara efisien dengan dan melalui pendayagunaan orang lain, sementara dalam arti luas manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif, sementara dalam arti sempit, manajemen adalah manajemen sekolah atau madrasah, yang mencakup hal-hal seperti sistem informasi sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, pengawas atau evaluasi, dan perencanaan dan pelaksanaan program sekolah.

Menurut Saebani Ahmad dan Komaruddin koko (2016: 17), manajemen adalah proses mengatur aktivitas pekerjaan untuk menghasilkan produk metode yang efektif dan efisien yang memungkinkan dan keterampilan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kinerja, dan adanya prosedur untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada yang dilakukan melalui kerja sama yang efisien, produktif, dan efektif. Menurut Susatyo (2013),

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa manajemen adalah sebagai proses keseluruhan tindakan yang dilakukan bersama dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

2.1.2. Pengertian Kurikulum

Kurikulum berasal dari bahasa latin *currere* yang berarti berlari di lapangan pertandingan (*race course*) sehingga makna kurikulum itu sendiri adalah arena pertandingan, tempat peserta didik bertanding untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai “garis *finish*” yang ditandai pemberian ijazah atau gelar kesarjanaan. Untuk pertama kalinya digunakan dalam bidang olahraga, istilah "kurikulum" berasal dari bahasa Yunani, "*curriculum*", yang berarti "pelari" dan "*currere*", yang berarti "tempat berpacu". Dengan demikian, pada zaman Romawi kuno, istilah "kurikulum" berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari *start* hingga *finish*.

Menurut Nidawati (2021:22-42), kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang harus ditempuh dalam proses pembelajaran untuk menjadi acuan sekaligus orientasi pendidikan. Menurut Hasan (2013:163-178), terdapat empat dimensi makna dalam mendefinisikan kurikulum, yaitu (1) kurikulum sebagai suatu ide/gagasan; (2) kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum suatu ide; (3) kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; (4) kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi sebagai suatu kegiatan.

Berdasarkan pengertian kurikulum dari berbagai sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu perencanaan pendidikan yang dapat memberikan pedoman tentang urutan materi, jenis, lingkup, serta proses pendidikan. Tujuan yang harus dicapai lebih baik dijabarkan dalam berbagai program kurikulum, juga dalam berbagai program yang mencerminkan arah dan tujuan pembelajaran.

2.1.3. Pengertian Manajemen Kurikulum

Menurut Triwiyanto dalam Rita Sulastini dkk. (2023:30), manajemen kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, karena kurikulum merupakan acuan dasar bagi proses pembelajaran yang terjadi di sekolah atau lembaga pendidikan, oleh karena itu manajemen kurikulum harus dilakukan dengan baik dan tepat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fokus utama manajemen sekolah adalah meningkatkan kualitas interaksi belajar-mengajar. Menurut Bunga (2021: 194) :

“Curriculum management is a directive used in learning strategies so as to produce student learning productivity well. With good direction, learning will run well and achieve educational goals. One of the goals of education is to maximize the intelligence of learners as the successor of the nation and to have noble morals and noble ethics.”

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dan dalam pelaksanaannya, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum adalah semua aspek manajemen kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, prioritas utama adalah mengintegrasikan dan merelevansikan kegiatan kurikulum dengan kurikulum nasional (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang relevan. Hal tersebut memastikan bahwa kurikulum tersebut konsisten dengan siswa dan lingkungan sekolah.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah sebuah proses yang menggunakan semua aspek manajemen untuk memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan di institusi pendidikan.

2.1.4. Fungsi Manajemen

Manajer selalu menggunakan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan.

Menurut Nasution et al. (2023: 862-872), fungsi manajemen adalah bagian penting dari proses manajemen yang selalu ada untuk mencapai tujuan.

Manajemen memiliki fungsi tertentu. Fungsi ini tidak berwujud atau *intangible*, Namun hasilnya dapat dirasakan, yaitu pekerjaan dengan *output* yang baik, kepuasan diri, dan produk, dan servis yang lebih baik.

Menurut Malayu, S.P. Hasibuan (dalam Tuala 2018: 413-434), terdapat tiga alasan mengapa fungsi manajemen dibagi menjadi bagian-bagian. Yang pertama adalah untuk membuat urutan diskusi tentang kegiatan organisasi menjadi lebih teratur, kedua adalah untuk membuat analisis diskusi menjadi lebih mudah dan mendalam, yang berarti arahan menjadi lebih jelas dan rinci, dan yang ketiga adalah untuk memberi manajer arah untuk melakukan pekerjaan.

Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan para ahli sangat beragam tergantung pada sudut pandang dan pendekatan masing-masing. fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perpektif persekolahan, dengan merujuk kepada pemikiran George R. Terry (2010) meliputi: (1) perencanaan (*planning*); (2) pengorganisasian (*organizing*); (3) pelaksanaan (*actuating*) dan (4) pengawasan (*controlling*). Fungsi manajemen POAC bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya, sehingga lebih banyak digunakan dan diterapkan. Untuk menjelaskan setiap fungsi manajemen implementasi kurikulum merdeka dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1.4.1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang akan dicapai dan strategi untuk mencapainya. Menurut Yunus et al. (2021: 17-26), perencanaan mencakup pemilihan atau penetapan tujuan organisasi serta penentuan

strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan peraturan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan sangat penting untuk memberikan kejelasan arah setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat dilakukan dan dilakukan seefektif mungkin.

Perencanaan merupakan bagian penting dari pengelolaan suatu organisasi.

Perencanaan mencakup hal-hal seperti menentukan kebutuhan, strategi untuk mencapai tujuan, isi program pendidikan, dan sebagainya. Hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Perencanaan juga mencakup merencanakan pembiayaan, menentukan jadwal dan prosedur kerja, serta menyusun program, termasuk jenis dan urutan kegiatan.

Menurut Indriyani dan Jannah, (2023: 98-103), penerapan kurikulum merdeka perlu dipersiapkan dengan baik. Mulai dari sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Perlu adanya sosialisasi kepada pendidik, wali murid, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Sehingga masing-masing orang dapat menjalankan perannya guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Menurut Hoch (2011: 8), terdapat tiga aspek penting dalam perencanaan yaitu kondisi dilapangan, gerakan serta disiplin, seperti yang telah dijelaskan : *“We distinguish planning theory ideas into three arenas formed between each of three spatial planning domains: “field”, “movement” and “discipline”*. Menurut George R.Terry (2010), perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian diatas, Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan dalam implementasi kurikulum merdeka meliputi kegiatan menentukan tujuan, menyusun kegiatan atau program baik kepala sekolah maupun pendidik, menyusun anggaran, dan menyediakan sarana dan prasarana.

2.1.4.2. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Terry (2010), pengorganisasian kegiatan yang dilakukan meliputi *staffing* (penempatan staf) dan pemaduan segala sumber daya organisasi.

Menurut Rosdiani (2018), pengorganisasian adalah sebuah proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, dan menetapkan wewenang yang secara relatif diberikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Fungsi ini, dilakukan oleh seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Yunus et al. (2021: 17-26), proses ini mencakup penempatan orang-orang pada setiap aktivitas, memberikan alat-alat yang diperlukan, dan menetapkan wewenang secara relatif diberikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Menurut Sutikno dalam Rusdiana (2015), secara akademik terdapat empat bentuk pengorganisasian kurikulum yang dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan, yaitu:

1. *Separated Subject Curriculum* (Kurikulum Mata Ajaran), kurikulum ini menyajikan semua bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran (mata pelajaran) yang terpisah satu sama lain
2. *Correlated Curriculum* (Kurikulum Bidang Studi), kurikulum ini menginginkan agar mata pelajaran berhubungan satu sama lain dan bersangkut paut (bersangkut paut), tetapi dengan batas yang dipertahankan agar pengetahuan anak tidak terpisah-pisah.

3. *Integrated Curriculum* (Kurikulum Terpadu), kurikulum ini menginginkan agar Diharapkan bahwa, karena bahan pelajaran bersifat konsisten, peserta didik dapat membentuk kepribadian yang kuat yang sesuai dengan dunia sekitarnya.
4. *Core Curriculum* (Kurikulum Inti), diberikan kepada semua peserta didik untuk mencapai program kurikulum secara keseluruhan. Berdasarkan masalah dan kebutuhan peserta didik, *core curriculum* menawarkan pengetahuan yang diperlukan untuk setiap peserta didik.

Pengorganisasian dapat terjadi ketika ada sekelompok orang yang bekerja sama, tujuan yang harus dicapai, pekerjaan yang harus dilakukan, pembagian tugas yang jelas, pengelompokan kegiatan, pendelegasian wewenang antara atasan dan bawahan, dan struktur organisasi yang efektif dan efisien.

Mengorganisasikan kegiatan adalah langkah selanjutnya setelah merencanakan.

Berdasarkan pengertian pengorganisasian dari berbagai sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian (*organizing*) adalah kegiatan penataan organisasi yang mencakup proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengorganisasian dalam implementasi kurikulum merdeka meliputi, menyusun dan mengatur jadwal program atau kegiatan, menentukan tugas dan tanggung jawab, serta menetapkan standar penilaian kerja.

2.1.4.3. Pelaksanaan (*actuating*)

Menurut Sagala (2010), pelaksanaan diartikan sebagai aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah

yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Menurut Terry (2010), *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut .

Menurut Tuala (2018: 413-434), pelaksanaan (*actuating*) adalah suatu tindakan yang mendorong personel untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif baik secara individu maupun kolektif, membangun dan meningkatkan hubungan kerja antar personel, mengerahkan semua sumber daya organisasi, dan memberikan motivasi. Pelaksanaan juga merupakan proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan, yang terdiri dari pengambilan keputusan.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan program pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan keadaan saat ini, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Pelaksanaan dalam implementasi kurikulum merdeka meliputi kepemimpinan kepala sekolah dalam menggerakkan personil, membina kerjasama, penggerakkan segenap sumber daya organisasi oleh kepala sekolah, pemberian motivasi, serta proses pembelajaran yang berlangsung.

2.1.4.4. Pengawasan (*controlling*)

Salah satu tugas manajemen yang paling penting dalam suatu organisasi adalah pengawasan. Jika fungsi pengawasan tidak ada, semua fungsi sebelumnya tidak akan berfungsi dengan baik. Menurut Nurhayati et al. (2022: 451-464), pengawasan adalah proses menentukan, menilai, dan mengoreksi pekerjaan untuk mengukur hasil pekerjaan. Tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari kesalahan dan, jika diperlukan, mengambil tindakan tegas terhadap kesalahan tersebut.

Menurut Yunus et al. (2021:17-26), dalam proses perencanaan organisasi, pengawasan adalah proses pemantauan untuk memastikan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Uliatunida (2020: 35-48), pengawasan juga dikenal sebagai kontrol, yang merupakan tindakan untuk memastikan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana. Pengawasan mencakup penetapan organisasi, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja. Menurut Tuala (2018: 413-434), pengawasan berarti melakukan upaya sistematis untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan atau program serta melakukan tindakan perbaikan jika terjadi kesalahan yang tidak direncanakan.

Menurut Kompri (2015), langkah-langkah dalam menyusun pengawasan, sebagai berikut.

- 1) Menetapkan standar dan metode mengukur ketercapaian dimulai dari menetapkan tujuan atau sasaran secara spesifik dan mudah diukur.
- 2) Pengukuran ketercapaian secara berulang melalui pengamatan langsung atau penggunaan instrumen survey yang berisi indikator efektivitas kerja.
- 3) Menetapkan apakah ketercapaian sesuai dengan standar.
- 4) Mengambil tindakan korektif bila hasil pengukuran menunjukkan terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan *controlling* (pengawasan) adalah sebuah upaya sistematis yang dilakukan untuk menilai, dan mengoreksi pekerjaan guna menghindari penyimpangan. Kegiatan pengawasan/*controlling* dalam implementasi kurikulum merdeka meliputi melakukan pengawasan kinerja organisasi oleh kepala sekolah, penggunaan teknik pengawasan, dan adanya tindak lanjut terhadap pengawasan.

2.2. Perkembangan Kebijakan Kurikulum di Indonesia

Kebijakan kurikulum harus sesuai dengan tujuan yang mempengaruhi pembangunan bangsa dikarenakan pendidikan merupakan pilar utama pembangunan dan terkait erat dengan sektor lain, yaitu kesejahteraan ekonomi, pergeseran politik, dan sosial-budaya, yang berkontribusi pada

stabilitas keamanan negara dan sangat berdampak pada arah kemajuan pendidikan. Sementara itu untuk mencapai pola kebijakan yang tepat, kebijakan kurikulum harus fleksibel dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Menurut Jayanti (2023: 16-19), sederhananya kebijakan kurikulum Indonesia terdiri dari tiga bagian yaitu: kebijakan pra-kemerdekaan, kemerdekaan, dan reformasi.

2.2.1. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Masa Pra Kemerdekaan

Kebijakan pendidikan pada masa pra kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Pertama, kebijakan Sekolah Kelas Dua yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis dan membaca. Kedua, kebijakan Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun dan terakhir 7 tahun.

2.2.2. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pasca Kemerdekaan

a.) Kebijakan Kurikulum 1968

Kurikulum diubah dari Pancawardhana menjadi mengajarkan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan keahlian khusus. Fokus pendidikan bukan hanya meningkatkan kecerdasan dan keterampilan tetapi juga membangun tubuh yang sehat dan kuat. Materi pelajaran tidak berkaitan dengan masalah nyata di lapangan; itu lebih bersifat teoritis.

a) Kebijakan Kurikulum 1975

Menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung.

b) Kebijakan Kurikulum 1984

Mengusung *process skill approach*. Kurikulum 1984 ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya (kurikulum 1975).

c) Kebijakan Kurikulum 1984

Mempunyai ciri-ciri : 1) berorientasi pada tujuan pembelajaran (instruksional), 2) pendekatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL), 3) materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, 4) menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, 5) Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, 6) menggunakan pendekatan keterampilan proses (*process skill approach*).

d) Kebijakan Kurikulum 1994

Pada sekolah kejuruan seperti STM (Sekolah Teknik Menengah), prinsip Link and Match adalah prinsip tentang betapa pentingnya pendidikan untuk terhubung dengan dunia kerja atau industri. Sebaliknya, dunia industri harus bekerja sama dengan sekolah untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil.

2.2.3. Kebijakan Kurikulum Masa Reformasi

Reformasi membawa dampak besar bagi perkembangan pendidikan nasional. Dengan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menjadi babak baru bagi sistem pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan pendidikan pun dikeluarkan sebagai amanat undang-undang.

a.) Kurikulum 2004

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan kurikulum tahun 2004. Pendidikan berbasis kompetensi berfokus pada meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

b.) Kurikulum 2006

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah nama untuk kebijakan kurikulum tahun 2006 ini. Ciri yang paling menonjol adalah guru diberi kebebasan untuk mengatur pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan lingkungan peserta didik dan kondisi sekolah.

c.) Kurikulum 2013

Pada tahun akademik 2013/2014, pemerintah memberlakukan kurikulum baru, Kurikulum 2013, sebagai pengganti KTSP. Selain itu, pemerintah terus mengembangkan KBK yang dimulai pada tahun 2004, yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sesuai dengan amanat UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk melakukan observasi, bertanya, berpikir logis, dan menyampaikan (mempresentasikan) pengetahuan yang mereka peroleh dari materi pelajaran.

2.2.4. Kebijakan Merdeka Belajar

Menurut Daulay, M. I., dan Fauziddin, M. (2023: 101-116), merdeka belajar merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diterbitkan dalam surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan merdeka belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik.

Menurut Kementerian Kebudayaan RI (2022: 25), merdeka belajar adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peserta didik diharapkan tidak hanya pandai menghafal tetapi juga memiliki kemampuan penalaran, analisis, dan pemahaman yang luas tentang belajar untuk pengembangan diri. Merdeka belajar versi Mendikbud berarti bahwa kurikulum harus digunakan dengan cara yang menyenangkan bagi peserta didik dan memungkinkan pendidik untuk mengembangkan cara berpikir inovatif. Hal tersebut dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap pembelajaran.

Menurut Sibagariang, dkk. (2021: 88-99) merdeka belajar merupakan kebebasan dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif guna pengembangan diri setiap individu dengan menentukan nasib dirinya sendiri. Menurut Muji, et. al. (2021: 377-384), merdeka belajar berarti kebebasan dalam suasana belajar yang tidak terasa mengikat diri dan tidak merasa terbebani bagi peserta didik dapat dilihat dari asik mereka dalam belajar, mencari informasi, menggali potensi diri dan begitu semangat dan

ekspresif dalam menyelesaikan tugas-tugas dari beban kurikulum menjadi indikator yang penting dalam tujuan pembelajaran.

Kurikulum Merdeka diterapkan dengan tujuan untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir peserta didik. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir ditujukan kepada pendidik. Jika pendidik belum merdeka dalam mengajar, tentu peserta didik juga ikut tidak merdeka dalam berpikir. Menurut Bell Hooks dalam Osman, et. al (2015: 195-198), mendidik sebagai praktik kebebasan adalah bentuk pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan mengasyikkan bagi pendidik dan peserta didik. Menurut Simonson, M., et. al. (2019), dalam praktik kebebasan ini, kedua belah pihak sama-sama pemain dalam berkontribusi dan berbagi pengalaman belajar. Peserta didik tidak hanya diajarkan informasi yang mereka harapkan untuk diingat dan diingat ketika ditanya, sebaliknya mereka belajar untuk berpikir kritis dengan cara yang tidak konformis dan tidak terkekang, pendidik yang mendidik sebagai praktik kebebasan mengajar tidak hanya untuk berbagi informasi tetapi untuk berbagi dalam pertumbuhan intelektual dan spiritual peserta didik.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa merdeka belajar adalah kurikulum yang memungkinkan peserta didik memilih pelajaran yang peserta didik sukai sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan dan memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa.

2.3. Evaluasi Kurikulum

2.3.1. Evaluasi Kurikulum 2013

Menurut Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam buku Kajian Akademik Kurikulum merdeka (2024) hasil evaluasi terhadap Kurikulum 2013 yaitu :

- 1) Beban materi pelajaran yang harus ditanggung peserta didik terlalu banyak (Puskurbuk, 2019). Hal itu diperburuk oleh adanya kekeliruan pemahaman guru tentang konsep ketuntasan belajar (*mastery learning*) dalam penerapan Kurikulum 2013. Banyak guru beranggapan bahwa

mastery learning adalah menuntaskan seluruh materi pembelajaran, sehingga mengesampingkan pemahaman peserta didik, sementara yang diharapkan Kurikulum 2013 adalah ketuntasan pemahaman peserta didik (Sisdiana dkk., 2019). Akibatnya, peserta didik dan orang tua mengeluhkan beban pelajaran yang begitu berat. Terutama di saat ujian, peserta didik SD harus memahami pelajaran IPS, IPA, Matematika untuk satu ujian saja (Maharani, 2014). Selain itu, beban pelajaran bagi peserta didik juga dapat dilihat secara kasat mata, sebagai contoh banyaknya buku pelajaran yang harus dibawa oleh peserta didik (terutama peserta didik SD) setiap harinya (Telaumbanua, 2014).

- 2) Kurangnya keselarasan isi kurikulum. Pada PAUD misalnya, meskipun pada Kurikulum 2013 tidak menjadikan kemampuan baca tulis sebagai kemampuan yang sudah harus dimiliki ketika anak selesai di PAUD, ternyata ketika masuk pada jenjang SD, peserta didik secara alamiah harus dapat membaca karena isi dari materi SD cukup tinggi. Hal ini juga didukung praktik PPDB di sebagian SD yang menjadikan kemampuan membaca sebagai persyaratan masuk SD. Di jenjang SMK, beban belajar peserta didik bertambah dari 46 jam menjadi 50 jam dalam seminggu (Djaelani, Pratikno, & Setiawan, 2019), sehingga SMK terjebak pada pemenuhan kurikulum daripada fokus pada penyaluran dan keselarasan dengan dunia kerja.
- 3) Beratnya beban administrasi guru. Kajian Puskurbuk (2019) menemukan, pada umumnya guru di Indonesia masih terkonsentrasi pada penyiapan dokumen yang bersifat administratif. Horn dan Banerjee (2009) mengkritisi praktik guru di negara berkembang yang terkesan mengejar pemenuhan kebutuhan administrasi pengajaran dan mengesampingkan pengajaran peserta didik yang sebenarnya membutuhkan persiapan yang lebih tinggi. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu

pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pada kenyataannya, guru belum berhasil membuat RPP yang menarik dan inspiratif seperti yang diharapkan karena bagian-bagian RPP yang terlalu kompleks, sehingga menguras tenaga guru untuk hanya terfokus pada urusan administrasi RPP (Ahmad, 2014; Krissandi & Rusmawan, 2015).

- 4) Kurangnya fleksibilitas penerapan kurikulum. Dalam konteks ini, Kurikulum 2013 belum memberikan keleluasaan satuan pendidikan untuk mengadaptasi pola keberagaman tujuan dan hasil akhir dari pembelajaran. Hal ini dikarenakan Pemerintah telah menyediakan materi beserta urutannya yang dianggap kaku dan harus diikuti oleh seluruh guru di Indonesia, sehingga pendidik tidak leluasa mengatur pembelajarannya sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan Ornstein dan Hunkins (2018), yang menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa pendidik merasa keberatan dalam menerapkan perubahan pendekatan, metodologi, dan cara evaluasi peserta didik adalah pendidik tidak merasa memiliki kurikulum tersebut. Kurikulum 2013 juga belum memberikan fleksibilitas pengaturan waktu pembelajaran kepada pendidik.

Pada awal pemberlakuan Kurikulum 2013, pemerintah menyediakan silabus secara lengkap. Langkah ini mendapatkan kritikan banyak pihak (Suyanto, 2019). Hal ini dikarenakan tidak semua satuan pendidikan dapat menerapkan silabus yang sama antara satu dengan yang lain. Mungkin pada satu satuan pendidikan, dapat menerapkan silabus yang dibuat oleh

Pemerintah, namun belum tentu bagi satuan pendidikan lain, misalnya konteks satuan pendidikan di desa tidak sama dengan konteks satuan pendidikan di kota. Demikian pula konteks satuan pendidikan swasta belum tentu sama dengan satuan pendidikan negeri. Ahmad (2014) mengibaratkan pembuatan silabus oleh Pemerintah seperti membuat satu pakaian dengan satu ukuran yang sama (*one size fits all*), tentu tidak akan bisa dipakai oleh semua orang. Misalnya pada jenjang SMK, Djaelani dkk. (2019) menyatakan, adanya silabus yang terpusat mengurangi kreativitas guru untuk memilih pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif, bermakna, dan kontekstual. Berdasarkan paparan tersebut, Kurikulum 2013 dirasa kurang mampu memberikan fleksibilitas kepada pendidik dan satuan pendidikan untuk menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran pada masa pandemi dan pasca pandemi.

Refleksi yang dapat diambil dari hasil evaluasi implementasi Kurikulum 2013, antara lain materi kurikulum yang ditetapkan terlalu padat dan memberatkan peserta didik, kurangnya keselarasan materi kurikulum antar jenjang (antara PAUD dan SD) dan antara SMK dengan dunia kerja, beratnya beban administrasi pendidik, serta penerapan kurikulum yang tidak dapat diimplementasikan secara fleksibel. Akibatnya, kurikulum yang dirumuskan secara nasional sulit diterapkan dan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik, karena materi wajib yang sudah sangat padat dan struktur kurikulum yang detail dan mengunci, sehingga tidak memberikan keleluasaan kepada pendidik dan satuan pendidikan untuk menyesuaikan dengan kekhasan daerahnya.

2.3.2. Evaluasi Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus (Kurikulum Darurat)

Menurut Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam buku Kajian Akademik Kurikulum merdeka (2024), pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia mengakibatkan pembelajaran tidak berjalan

normal. Sebagian besar peserta didik harus belajar dari rumah. Perubahan pembelajaran yang awalnya bertumpu pada metode tatap muka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan intensitas jumlah hari dan jam belajar dalam sehari yang menurun secara signifikan. Mayoritas peserta didik hanya menerima instruksi, umpan balik, dan interaksi yang terbatas dengan pendidiknya. Kondisi ini berkontribusi pada menurunnya kemampuan peserta didik, ketidaktercapaian pembelajaran, ketimpangan pengetahuan yang makin lebar, perkembangan emosi dan kesehatan psikologis yang terganggu, kerentanan putus sekolah, serta potensi penurunan pendapatan peserta didik di kemudian hari (Afkar dan Yarrow, 2021). Tantangan dalam penerapan PJJ lainnya adalah keterbatasan akses internet, perangkat digital serta kapasitas baik guru, orang tua, maupun peserta didik (Zamjani dkk., 2020).

Studi yang dilakukan oleh Puslitjak dan INOVASI (2021) menunjukkan terjadinya ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*), yaitu ketika peserta didik kehilangan kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya, tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas, maupun mengalami efek majemuk karena tidak menguasai pembelajaran pada setiap jenjang. Selain itu, dampak lain dari PJJ adalah makin melebarnya kesenjangan hasil belajar (*learning gap*) antar peserta didik dalam satu kelas dan penggunaan platform pembelajaran digital antara satuan pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan, serta di daerah 3T dan kawasan non-3T (Puslitjak & INOVASI, 2021). Apabila tidak ada intervensi yang mendorong pendidik untuk menyusun pembelajaran yang memperhatikan keragaman kemampuan belajar peserta didik, maka peserta didik dengan kemampuan rendah akan makin tertinggal dari peserta didik lainnya. Peserta didik yang memiliki akses terhadap perangkat digital, memiliki guru adaptif, pada kondisi sosial ekonomi lebih tinggi, serta mempunyai orang tua yang aktif berkomunikasi dengan guru cenderung memiliki kemampuan di atas rata-rata.

Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud (saat ini Kemendikbudristek) mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Pedoman ini mengatur tentang kurikulum pada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai daerah dalam kondisi khusus oleh pemerintah pusat atau daerah. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum untuk kondisi khusus mengacu pada kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Sehingga, kurikulum darurat ini mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan pembelajaran, penentuan kenaikan kelas, dan kelulusan.

Setelah berjalan hampir satu tahun ajaran, Kemendikbud melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum darurat. Hasil evaluasi tersebut secara umum menunjukkan bahwa peserta didik pengguna kurikulum darurat mendapatkan hasil asesmen yang lebih baik daripada pengguna Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosial ekonominya. Penggunaan kurikulum darurat secara signifikan juga mampu mengurangi indikasi learning-loss selama pandemi baik untuk capaian literasi maupun numerasi (INOVASI, 2021). Hasil positif di atas menunjukkan bahwa intervensi kurikulum darurat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pemulihan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Namun kurikulum darurat ini masih memerlukan pengembangan kurikulum yang komprehensif agar mampu menghadapi krisis pembelajaran yang menjadi permasalahan akut di Indonesia. Alternatif kurikulum yang diperlukan oleh satuan pendidikan haruslah dapat mengakomodasi keragaman karakteristiknya agar kualitas pembelajaran meningkat, hasil belajar peserta didik optimal, dan mengurangi dampak-dampak negatif pandemi COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia.

Penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum tentunya diperlukan sebagai penyesuaian dengan perkembangan situasi dan kebutuhan terkini serta menjawab berbagai tantangan baru yang muncul di Abad 21 maupun masalah-masalah lama yang tak kunjung terpecahkan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan kurikulum yang lebih fleksibel dengan menyempurnakan dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan terkini, terbukti efektif dalam mendongkrak capaian pembelajaran peserta didik (Paparan Kemendibudristek, 2021b).

Sejatinya, kurikulum darurat hanya melakukan intervensi Kurikulum 2013 dengan melakukan penyederhanaan materi sebagai tindak lanjut dari evaluasi Kurikulum 2013 untuk mengurangi beban materi pelajaran yang harus ditanggung peserta didik. Perlu ada langkah lanjutan untuk memperbaiki Kurikulum 2013 yaitu menyelaraskan isi kurikulum antar jenjang dan dunia kerja, mengurangi beban administrasi guru, dan fleksibilitas penerapannya dengan mengintervensi kerangka dasar dan struktur Kurikulum 2013.

2.4. Kurikulum Merdeka Belajar

2.4.1. Konsep Kurikulum Merdeka Belajar

Menurut Rita Sulastini dkk. (2023:10), kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pada kurikulum merdeka pendidik diberikan kebebasan dalam memilih perangkat ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka belajar berfokus pada pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan *soft skills* dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini juga fleksibel sehingga pendidik dapat menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Menurut Suryaman (2020:43), dengan kurikulum ini, pendidik dapat memilih berbagai perangkat ajar untuk disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat kita sebagai peserta didik.

Tabel 1. Gerakan Merdeka Belajar

Konsep Merdeka Belajar	
Pelaksanaan USBN mulai tahun 2020 dikembalikan ke pihak sekolah.	Motto yang terkenal: “Merdeka Belajar Guru Penggerak”
Pada tahun 2021, Nadiem Makarim menghapus sistem UN, dan diganti dengan sistem baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.	
Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari 13 komponen menjadi 3 komponen.	
Kebijakan dalam penentuan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang lebih luas.	

Sumber: Kemendikbud (2023) Latar Belakang Kurikulum Merdeka – Merdeka Mengajar, Kemdikbud.go.id.

Konsep Merdeka Belajar oleh Nadiem Makarim terdorong karena keinginan menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Menurut Sibagariang, dkk. (2021:88-99), berbagai kebijakan dari Nadiem Makarim tentang konsep-konsep dalam merdeka belajar adalah:

a. Kebijakan tentang penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

Sesuai dengan amanat Nadiem Makarim yang ada pada peraturan Menteri dan kebudayaan No 43 pada tahun 2019 bahwa pelaksanaan ujian sekolah yang berstandar nasional terakhir dilaksanakan pada tahun 2020. Ujian sekolah dikembalikan pada esensinya bahwa penilaian tersebut dilakukan oleh pendidik dan sekolah. Kelulusan dan peserta didik di akhir jenjang merupakan wewenang dari sekolah. Sekolah diberi kebebasan dan keleluasaan dalam penyelenggaraan ujian tersebut. Pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan ujian di sekolah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah melalui dikbud. Pemerintah daerah akan memeriksa dan memastikan apakah ujian yang dilakukan disekolah adalah ujian yang berkualitas sesuai dengan mutu yang diharapkan. Maka untuk mencapai mutu yang diharapkan pemerintah daerah harus mengumpulkan beberapa pendidik dalam sekolah di wilayahnya untuk melaksanakan pelatihan dalam menyusun soal-soal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

b. Penggantian Ujian Nasional menjadi penilaian asesmen kompetensi minimum dan survei karakter

Sesuai dengan keputusan Menteri pendidikan pelaksanaan ujian nasional yang terakhir adalah tahun 2020. Penyelenggaraan UN untuk tahun 2021 dilaksanakan melalui penilaian asesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter menjadi akan diganti dengan sistem yang baru, yaitu Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Asesmen kompetensi minimum (AKM) dalam merdeka belajar, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berliterasi dan kemampuan numerik. Dalam bidang literasi, peserta didik tidak hanya mampu menghafal dan menerapkan materi yang dibaca, namun diharapkan mampu untuk memiliki pemikiran yang kritis dalam memahami materi yang diberikan. Dalam hal kemampuan numerik, peserta didik diharapkan mampu berpikir secara luas, tidak hanya sekedar mampu menghafal rumus-rumus atau formula yang ada namun lebih dari itu, peserta didik harus mampu menemukan dan memiliki konsep dasarnya dalam penyelesaian masalah yang lebih luas. Fokus dari AKM ini adalah menciptakan peserta didik yang mampu berfikir secara kritis dengan menggunakan kemampuan kognitifnya.

Konsep penilaian ini tidak berfokus pada ujian nasional seperti penilaian sebelumnya namun pada penugasan dan portofolio. Maka peserta didik akan memiliki ruang dalam mengembangkan minat dan bakat mereka. Dengan konsep ini diharapkan kedepan tidak ada lagi stigma peserta didik yang pintar dan bodoh karena setiap manusia telah tercipta dengan bakat alami yang dimiliki masing-masing. Semua anak memiliki potensi yang berbeda dan pasti akan menghasilkan suatu karya yang besar jika diasah dan dilatih. Maka cara penilaiannya tidak bisa dilakukan dengan tes yang sama secara formal kepada setiap orang.

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sebelum melakukan pembelajaran pendidik harus melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP harus disusun dengan 13

komponen secara rinci dan mendetail sehingga RPP terdiri dari lembaran lembaran yang sangat banyak. Pendidik terbebani dengan tugas-tugas administrasi sehingga kurang fokus pada pembelajaran. Untuk menyikapi hal ini, menteri pendidikan membuat kebijakan baru terkait dengan penyusunan RPP. Komponen dalam kebijakan yang baru tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, terdiri dari (1) Tujuan pembelajaran (2) Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran (3) Penilaian yang terdiri dari penilaian kognitif, afektif dan sikap, dengan RPP yang selebar ini, pendidik diberi kebebasan untuk lebih kreatif dalam mengembangkannya secara efektif dan efisien sesuai dengan situasi yang ada demi perkembangan peserta didik.

d. Kebijakan dalam penentuan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang lebih luas

Dalam kebijakan ini, penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan sistem zonasi yang lebih luas dan fleksibel. Tujuan dari kebijakan zonasi ini adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas yang merata dari beberapa daerah yang ada. Pemerataan kualitas pendidikan diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu mengelola sumber daya alam yang ada. Komposisi PPDB adalah jalur zonasi minimal 50%, Jalur Afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan 5% sedangkan jalur prestasi adalah sisanya 30% yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

2.4.2. Tujuan Kurikulum Merdeka Belajar

Tujuan dari kurikulum merdeka belajar adalah agar pendidik, peserta didik, dan orang tua dapat memiliki suasana yang menyenangkan. Kurikulum merupakan seperangkat peraturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Adanya kurikulum bertujuan untuk mencapai pendidikan yang lebih berkualitas. Adapun tujuan kurikulum merdeka yaitu:

- a) Menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan pendidik. Kurikulum ini menekankan pendidikan Indonesia pada

pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

- b) Mengejar kemajuan pendidikan merupakan salah satu tujuan kurikulum merdeka yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana peserta didik diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran.
- c) Mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Dengan adanya kurikulum merdeka, diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, di mana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Kurikulum ini juga memudahkan pendidik dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik.

2.4.3. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) adalah serangkaian kebijakan yang memungkinkan sekolah untuk mengubah kurikulum mereka. Menurut Rahmayanti, D., dan Hartoyo, A. (2022: 7174-7187), pendataan kesiapan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) menunjukkan 35.334 sekolah dalam kategori mandiri belajar yang siap untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dilakukan pada kelas 1 dan 4, karena termasuk angkatan pertama dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, sebagai persiapan pelaksanaan kurikulum merdeka tentu saja sekolah dan pendidik perlu mempersiapkan dengan baik dimulai dari memahami struktur kurikulum merdeka, asesmen di dalamnya, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, pelaksanaan proyek dan lainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengikuti kegiatan pendidik penggerak maupun sekolah penggerak. Selain itu bisa dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan mandiri maupun kelompok oleh pendidik

atau sekolah seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), *Forum Group Discussion* (FGD) atau komunitas guru lainnya, saling berbagi praktik baik, konten pembelajaran, mencari informasi mandiri melalui buku, ikut serta dalam webinar, mengunduh aplikasi *platform* merdeka mengajar yang bisa diakses oleh pengguna *android*, artikel yang dijumpalkan ataupun situs resmi yang berisi kurikulum merdeka.

Pemerintah mendukung implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar dengan menyediakan perangkat ajar berupa buku teks dan bahan ajar pendukung, pelatihan dan penyediaan sumber belajar bagi pendidik, kepala sekolah dan pemerintah daerah, serta jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi pendidik. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. Implementasi kurikulum berarti penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas baru dengan tujuan mengubah sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Dengan kata lain, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dirancang pada tahap sebelumnya, kemudian diuji coba dengan pelaksanaan dan pengelolaan secara konsisten disesuaikan dengan situasi lapangan dan karakteristik peserta didik.

Menurut Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) (2022) terkait Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Secara mandiri, harus memperhatikan 4 (empat) hal antara lain :

- a) Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri merupakan alternatif satuan pendidikan tahun pelajaran 2022/2023
- b) Terdapat 6 (enam) strategi yang difokuskan pada penguatan komunitas belajar pendidik dan satuan pendidikan yang digunakan oleh Kemdikbud
- c) IKM didukung dan dikendalikan langsung oleh dinas pendidikan kabupaten dan kabupaten/kota melalui peran dinas pendidikan kota
- d) Satuan pendidikan yang diterjunkan oleh IKM mempersiapkan diri secara mandiri sesuai pilihan pelaksanaan dan persiapan.

2.5. Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar

2.5.1. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan upaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pembelajaran paradigma baru. Oleh karena itu, pemahaman mengenai profil pelajar Pancasila dan pembelajaran paradigma baru perlu diupayakan. Selain informasi dari panduan ini, pendidik dapat mempelajari kedua konsep tersebut dengan mengakses dokumen terkait lainnya.

Profil pelajar Pancasila yang selanjutnya disebut profil pelajar, merupakan pelajar yang memiliki pola pikir, bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal dan menjunjung tinggi toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Profil pelajar juga memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir antara lain: berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovatif, kreatif, berliterasi informasi, berketakwaan, berakhlak mulia, dan moderat dalam keagamaan.

Terkait pengembangan karakter profil pelajar Pancasila, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (2022), mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 009/H/KR/2022 untuk membantu pemahaman lebih intensif dimensi, elemen, dan sub elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menyempurnakan penanaman pendidikan karakter siswa dengan profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari 6 dimensi, tiap dimensi yang dijabarkan secara detail ke dalam masing-masing elemen.

Tabel 2. Dimensi dan Elemen Profil Pelajar Pancasila

NO	Dimensi	Elemen
1	Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia	- Akhlak beragama - Akhlak pribadi - Akhlak kepada manusia - Akhlak kepada alam - Akhlak bernegara
2	Berkebhinnekaan Global	- Mengenal dan menghargai budaya - Komunikasi dan interaksi antar budaya - Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinnekaan - Berkeadilan sosial
3	Gotong Royong	- Kolaborasi - Kepedulian - Berbagi
4	Mandiri	- Pemahaman diri dan situasi - Regulasi diri
5	Bernalar Kritis	- Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan - Menganalisis dan mengevaluasi penalaran - Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri
6	Kreatif	- Menghasilkan gagasan yang orisinal - Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal - Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan

Sumber : Rahmadayanti, D., dan Hartoyo, A. (2022: 7174-7187).

2.5.2. Struktur Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar

Menurut Rahmadayanti, D., dan Hartoyo, A. (2022: 7174-7187), Untuk mendukung terlaksananya pembelajaran paradigma baru, diperlukan pembaharuan dalam pengorganisasian pembelajaran. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan masing-masing yang dibagi dalam:

- a. Kewenangan pemerintah pusat; mengatur struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen.
- b. Kewenangan pemerintah daerah; mengatur visi misi dan tujuan sekolah, profil pelajar di sekolah, kebijakan lokal terkait kurikulum, proses pembelajaran dan asesmen, pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dan pengembangan perangkat ajar.

Struktur Kurikulum Merdeka di sekolah dasar diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Belajar Pengembangan & Pembelajaran (2022), yang terbagi menjadi 3 fase, yakni:

- a. Fase A untuk peserta didik kelas I dan 2
- b. Fase B untuk peserta didik kelas 3 dan 4
- c. Fase C untuk peserta didik kelas 5 dan 6

Kurikulum Merdeka yang ditetapkan sebagai kurikulum pemulihan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dibagi menjadi 2 kegiatan, yakni:

- a. Pembelajaran intrakurikuler dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran.
- b. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan proporsi beban belajarnya dialokasikan sekitar 20%-30% per tahun. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan secara fleksibel, baik dari muatan maupun dalam waktu pelaksanaannya. Dari muatan, acuan dari proyek ini ada ada capaian profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan fase peserta didik, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Dari pengorganisasian waktu pelaksanaannya, proyek dapat dilakukan dengan menambahkan alokasi dari jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah keseluruhan waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidaklah sama semua.

2.5.3. Perangkat Ajar

Menurut Rahmadayanti, D., dan Hartoyo, A. (2022: 7174-7187), perangkat ajar adalah ragam bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upayanya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Perangkat ajar terdiri dari buku teks pelajaran, modul ajar, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, video pembelajaran, dan lainnya. Adapun perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan antara lain:

a. Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisikan tujuan, langkah-langkah, media pembelajaran, dan asesmen

yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pemerintah telah menyediakan beraneka contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema-tema utama yang telah dirumuskan, sehingga sekolah dan pendidik mempunyai kewenangan dan keleluasaan dalam menyusun, memilih, dan memodifikasi sendiri menjadi topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan konteks, karakteristik, potensi dan kebutuhan peserta didik. Pendidik yang telah menyusun modul proyek yang disediakan oleh pemerintah tidak perlu lagi menyusun modul proyek.

Menurut Rahmadayanti, D., dan Hartoyo, A. (2022: 7174-7187), pada jenjang sekolah dasar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil alokasi waktu sekitar 20%-30% dari total jam pelajaran per tahun, sehingga alokasi waktu untuk tiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidaklah sama yang memungkinkan pelaksanaan proyek yang satu dengan proyek lainnya tidaklah sama. Dalam pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menambahkan alokasi jam pelajaran proyek dari seluruh mata pelajaran dan total waktu pelaksanaan tiap proyek tidak harus sama. Di jenjang sekolah dasar, dalam 1 tahun ajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilaksanakan dengan memilih sekurang-kurangnya 2 (dua) proyek dengan 2 (dua) tema berbeda.

b. Modul Ajar

Menurut Rahmadayanti, D., dan Hartoyo, A. (2022: 7174-7187), modul ajar yang digunakan dalam kurikulum merdeka merupakan dokumen yang berisikan tujuan, langkah, media pembelajaran dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki kebebasan untuk menyusun sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyediakan contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk sekolah, pilihan yang memudahkan dan meringankan beban pendidik dalam penyusunan rancangan pembelajaran.

Komponen dalam modul ajar dalam kurikulum merdeka adalah dasar dalam penyusunan modul ajar dan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran yang bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan tiap mata pelajarannya. Tidak semua komponen wajib dicantumkan pendidik dalam dalam modul ajar. Terdapat 3 (tiga) bagian komponen modul ajar yaitu; Informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran.

c. Buku Teks

Menurut Rahmadayanti, D., dan Hartoyo, A. (2022: 7174-7187), buku teks dalam Kurikulum Merdeka terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama adalah buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran, terdiri atas buku peserta didik dan buku panduan pendidik. Buku peserta didik merupakan buku pegangan peserta didik, dan buku pendidik merupakan acuan pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku peserta didik tersebut. Berdasarkan kebutuhan dan karakteristik mata pelajaran, beberapa mata pelajaran hanya terdapat buku panduan pendidik saja, seperti Pendidikan Pancasila, Seni dan Prakarya, dan PJOK. Buku teks utama diimplementasikan secara terbatas di sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka.

2.6. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis yang dikemukakan. Penelitian yang relevan ini sebagai berikut.

1. Hartono, M. I., dkk (2023), terkait Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Di SD Negeri 2 Kampung Baru Kabupaten Majene. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi manajemen kurikulum merdeka di SD Negeri 2 Kampung Baru Kabupaten Majene dengan mengacu pada lingkup manajemen yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Hasil implementasi manajemen kurikulum yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Negeri 2 Kampung Baru Kabupaten Majene menggunakan pendekatan dan model grass roots approach atau segala aktivitas menitikberatkan dari bawah, dalam hal ini guru sebagai sentral kurikulum. Adapun persamaan antara penelitian yang

dilakukan oleh Hartono, M. I., dkk (2023) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama- sama meneliti implementasi manajemen kurikulum merdeka.

2. Ineu Sumarsih dkk (2022), terkait implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak di SDN Guruminda 244 Bandung menyatakan hasil penerapan Kurikulum Merdeka menghasilkan peserta didik yang memiliki 5 karakter profil pelajar pancasila serta membutuhkan peran besar banyak pihak dalam mewujudkan sekolah penggerak dengan mendorong berbagai program yang inovatif. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sumarsih et al., (2022) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama- sama meneliti implementasi kurikulum merdeka namun peneliti akan lebih fokus dalam fungsi manajemen kurikulumnya.
3. Jayanti , M. (2023) terkait Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar Studi Kasus SMP Trimurjo. Pada penelitian ini mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar di SMPN 1 Trimurjo dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPN 1 Trimurjo berada pada tahap pengembangan dan penyempurnaan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Jayanti , M. (2023) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama- sama meneliti implementasi manajemen kurikulum merdeka namun peneliti akan melakukan penelitian pada tingkat sekolah dasar.
4. Komariah (2018) yang meneliti terkait dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran menunjukkan bahwa kurikulum dan pembelajaran di SDIT Kewirausahaan Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan fungsi manajemen POAC. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Komariah (2018) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama- sama meneliti implementasi manajemen kurikulum merdeka.
5. Maulidia, M., dkk (2023), terkait Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Pada

penelitian ini menunjukkan bahwa pada kurikulum merdeka belajar, administrasi yang dibuat oleh para guru tidaklah sebanyak kurikulum terdahulu. Dimulai dari penyusunan ATP yang lebih sederhana namun sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran siswa pada kurikulum merdeka tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Namun yang menjadi pembeda adalah penyusunan bahan ajar yang dilakukan oleh pendidik lebih sederhana. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Maulidia, M., dkk (2023) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama- sama meneliti implementasi manajemen kurikulum merdeka namun peneliti akan fokus dalam fungsi manajemen kurikulumnya saja.

6. Rahayu dkk. (2022), yang meneliti implementasi kurikulum merdeka pada sekolah penggerak dengan hasil implementasi Kurikulum Merdeka sudah dilakukan secara optimal. Selain itu, kepala sekolah dan guru memegang peranan penting dalam melakukan perubahan dalam konteks penerapan Kurikulum Merdeka. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al., (2022) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama- sama meneliti implementasi kurikulum merdeka namun peneliti akan lebih fokus dalam fungsi manajemen kurikulumnya.
7. Ujang Cepi Barlian, dkk (2022) yang meneliti terkait implementasi kurikulum merdeka di SDN 244 Guruminda, dimana hasil penelitian adalah SDN 244 Guruminda telah membuat perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka berupa perangkat pembelajaran yang sesuai dengan panduan pembuatan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka yaitu menganalisis Capaian Pembelajaran (CP) untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, perencanaan asesmen diagnostik, mengembangkan modul ajar yang menyesuaikan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik dan perencanaan asesmen formatif dan sumatif. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ujang Cepi Barlian (2022) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama- sama meneliti implementasi kurikulum merdeka.

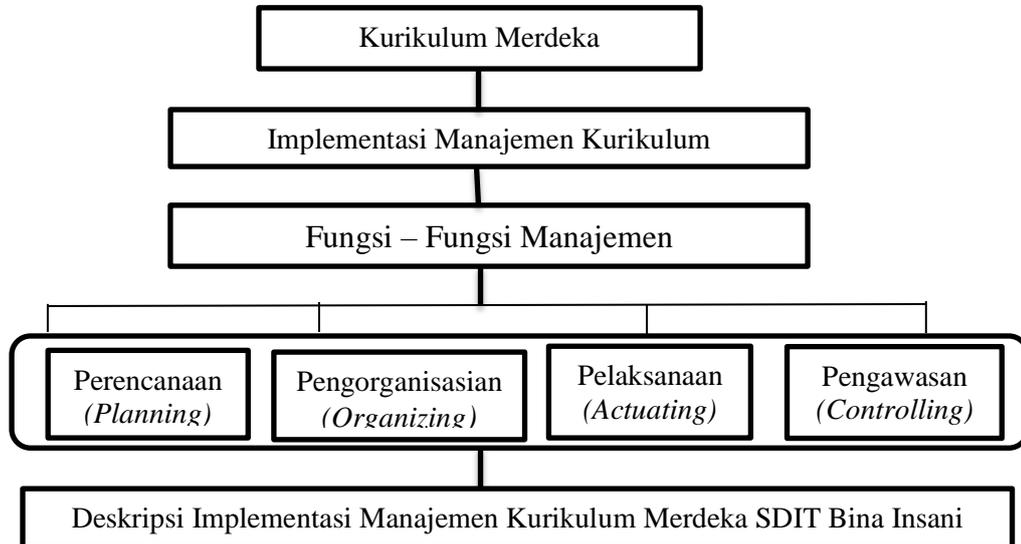
2.7. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2020: 60), kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti, sehingga perlu dijelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Menurut Rachmawati dkk. (2022: 3613-3625), kurikulum merdeka belajar tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik menjadi lebih sopan, berani, mandiri, dan berani. Pengembangan karakter dinilai juga sesuai dengan profil pelajar pancasila.

SDIT Bina Insani telah menggunakan kurikulum merdeka, Kurikulum merdeka belajar di lakukan secara bertahap di beberapa kelas dan jenjang pendidikan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, sistem dan susunan kurikulum merdeka belajar ini sangat sederhana untuk diterapkan.

Penelitian ini meneliti bagaimana manajemen kurikulum merdeka diterapkan di SDIT Bina Insani dan apakah fungsi manajemen kurikulum sudah diterapkan.



Gambar 1. Kerangka pikir
(Sumber : Analisis peneliti)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Rancangan Penelitian

3.1.1. Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti terjun ke lokasi secara langsung, memahami, mempelajari, dan menggali informasi tentang fenomena yang kompleks. Menurut Moelong (2016:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis atau statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Sholihah (2020: 43), mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah proses melihat atau melihat objek secara menyeluruh, dan dasar analisisnya adalah pengalaman. Ningsih (2020: 31), mengatakan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh dan utuh, dengan deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti akan menemukan solusi untuk masalah yang dibahas. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena tertentu secara sistematis dan faktual. Untuk menghasilkan hasil yang akurat, metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Terkait pengertian pendekatan kualitatif diperjelas dengan pendapat Sugiyono (2021: 17), yang menyatakan bahwa pengertian pendekatan kualitatif juga disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah. Peneliti memerlukan pengetahuan teoritis yang kuat dan pengetahuan luas untuk bertanya, menganalisis, memotret, dan

mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang “Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar di SDIT Bina Insani, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji”.

3.1.2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai rancangan penelitian. Kasus ini diselidiki secara menyeluruh selama proses penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana atau mengapa kasus tersebut diteliti. Menurut Creswell dalam Fitrah dan Luthfiah (2017: 207), mengatakan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian kualitatif yang melibatkan banyak sumber informasi, melakukan pengumpulan data yang mendalam dan melaporkan deskripsi kasus dan temanya. Penelitian studi kasus juga melibatkan penelitian tentang sistem terbatas kontemporer, kehidupan nyata, atau berbagai sistem terbatas.

3.2. Setting Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SDIT Bina Insani yang beralamat di Desa Simpang Pematang, RT 06 RW 04 Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung.

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap yaitu tahun pelajaran 2023/2024.

3.3. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai alat aktif dalam penelitian kualitatif dengan melakukan observasi cermat dan mengumpulkan data. Kualitas penyelesaian masalah ditentukan oleh kehadiran peneliti secara langsung di lapangan. Peran peneliti sebagai *key instrument* sesuai ciri penelitian kualitatif yang mengharuskan untuk berusaha membangun hubungan yang baik dengan

informan sebagai sumber data agar data yang mereka peroleh lengkap dan valid, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti disebut sebagai *human instrument* yang bertanggung jawab untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan tentang temuan penelitian.

3.4. Sumber Data Penelitian

3.4.1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2020: 296), sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer yang akan diperoleh peneliti dalam penelitian kali ini yaitu melalui wawancara terhadap :

- a) Kepala Sekolah SDIT Bina Insani Mesuji sebagai penanggung jawab kegiatan dan program sekolah serta yang mengkoordinir.
- b) Waka Kurikulum SDIT Bina Insani Mesuji sebagai penanggung jawab kurikulum yang diterapkan di sekolah.
- c) Pendidik SDIT Bina Insani Mesuji sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran di kelas.

3.4.2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono dalam Rosanti (2021: 31), data sekunder adalah sumber data penunjang, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh melalui catatan lapangan, dokumentasi, dan rekaman hasil wawancara.

Berikut jumlah informan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 .

Tabel 3. Jumlah Informan Penelitian

No	Sumber Data	Kode	Jumlah
1	Kepala Sekolah	KS	1
2	Waka Kurikulum	WK	1
3	Pendidik	P	2
Jumlah Seluruh Informan			4

(Sumber : Analisis peneliti)

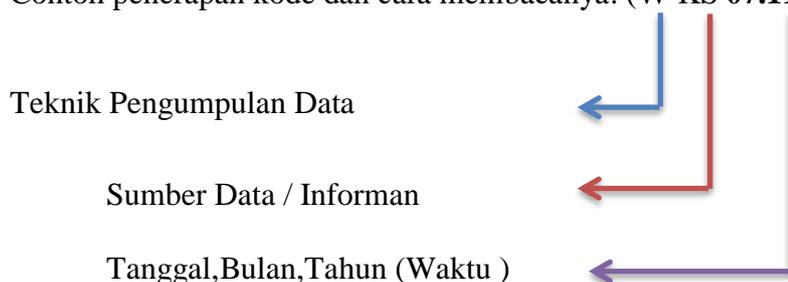
Penentuan kategori koding, setiap kategori diberi kode yang menggambarkan cakupan makna, pengkodean dibuat berdasarkan teknik pengumpulan data dan sumber data. Berikut pengkodean informan penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengkodean Informan Penelitian

Teknik Pengumpulan Data	Kode	Sumber Data	Kode
Wawancara	W	1. Kepala Sekolah 2. Waka Kurikulum 3. Pendidik	1. KS 2. WK 3. P
Observasi	O	1. Kepala Sekolah 2. Waka Kurikulum 3. Pendidik	1. KS 2. WK 3. P
Studi Dokumen	D	1. Kepala Sekolah 2. Waka Kurikulum 3. Pendidik	1. KS 2. WK 3. P

(Sumber : Analisis peneliti)

Contoh penerapan kode dan cara membacanya: (**W KS 07.11.23**)



Menurut Nasution (2003), tindakan, kata-kata, dan orang-orang yang diamati atau diwawancarai adalah sumber data utama yang dicatat melalui catatan tertulis, pengambilan foto, atau film. Selain itu, agar tidak menyinggung individu yang terlibat dalam penelitian ini, penulis memberi kode kepada informan. Pengecekan data secara bolak-balik membutuhkan kode. Menurut Huberman (2014), pengkodean secara khusus didasarkan pada metode pengumpulan data dan informan.

Pada sumber data kepala sekolah diberi kode KS, waka kurikulum diberi kode WK, pendidik diberi kode P, peserta didik diberi kode PD. Teknik pengumpulan data untuk observasi diberi kode O, wawancara diberi kode W, dan studi dokumen diberi kode D.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020: 296), “teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan”. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik ini akan digunakan dalam penelitian, namun wawancara dan observasi akan lebih banyak digunakan karena dapat mengungkap makna yang tersembunyi di balik fenomena yang terlihat.

Berikut penjelasan terkait teknik pengumpulan data tersebut.

3.5.1. Wawancara

Menurut Salim dan Haidir (2019: 85), wawancara adalah proses berbicara yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari berwawancara dengan menggunakan protokol wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan dan bertatap muka dengan informan untuk mendengarkan informasi atau keterangan mereka. Peneliti mewawancarai informan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena, oleh karena itu untuk memastikan bahwa informan yang diwawancarai memberikan informasi atau data yang akurat, pewawancara harus netral. Hal ini dikarenakan informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara kadang-kadang tidak sesuai dari seharusnya dan dapat dianggap subjektif dan tidak akurat.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan lebih fleksibel dari pada wawancara terstruktur. Tujuan dari penggunaan wawancara semi terstruktur adalah untuk membuat masalah lebih terbuka dan memungkinkan orang yang diwawancarai untuk memberikan pendapat mereka. Situasi informan dan kondisinya harus dipertimbangkan dalam wawancara yang akan dilakukan. Berikut kisi-kisi wawancara agar memudahkan peneliti dalam pengumpulan data.

Tabel 5. Kisi-kisi Metode Wawancara

Fokus	Indikator	Informan		
		P	KS	WK
Perencanaan (<i>Planning</i>) dalam implementasi manajemen kurikulum merdeka	1. Penentuan visi dan misi 2. Penyusunan program / kegiatan 3. Penyusunan anggaran sekolah 4. Penyediaan sarana dan prasarana	✓	✓	✓
Pengorganisasian (<i>Organizing</i>) dalam implementasi manajemen kurikulum merdeka	1. Penyusunan dan pengaturan jadwal mengajar 2. penentuan tugas dan tanggungjawab 3. Penyusunan dan penetapan kriteria penilaian kinerja			
Pelaksanaan (<i>Actuating</i>) dalam implementasi manajemen kurikulum merdeka	1. Kepemimpinan kepala sekolah untuk menggerakkan personil 2. Pembinaan kerja sama 3. Penggerakan sumber daya organisasi dan memberi motivasi personil 4. Proses pembelajaran kurikulum merdeka			
Pengawasan (<i>Controlling</i>) dalam implementasi manajemen kurikulum merdeka	1. Pengawasan kinerja 2. Penggunaan teknik pengawasan pelaksanaan 3. Tindak lanjut pengawasan			

Sumber : Diadaptasi dan dimodifikasi dari Yunus, et.al. (2021), Irmayanti, R. W. (2023), dan analisis penulis.

Peneliti dapat menambah sampel atau informan jika data penelitian belum cukup. Dengan memilih sumber utama kepala sekolah, dan waka kurikulum untuk mendapatkan data yang diperlukan, teknik ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi objek penelitian.

3.5.2. Observasi

Menurut Salim dan Haidir (2019: 86), observasi dalam penelitian berarti fokus pada suatu objek dan menggunakan seluruh indera untuk mendapatkan data. Alat yang dapat digunakan untuk observasi termasuk pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Kunci keberhasilan dari observasi ditentukan oleh peneliti itu sendiri karena peneliti melihat dan mendengarkan lalu menyimpulkan serta memberi makna tentang objek yang diteliti dalam realitas dan konteks yang alami.

3.5.3. Dokumentasi

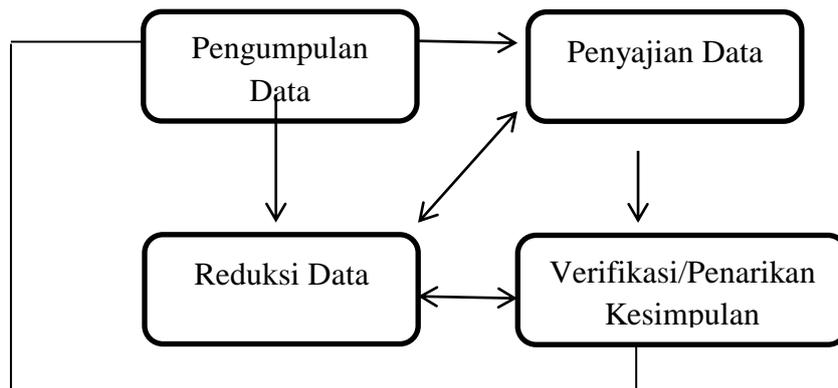
Dokumentasi dalam penelitian ini, sebagai akhir dan pelengkap pengumpulan data. Menurut (Rukajat,2018) dokumentasi digunakan untuk mengungkapkan peristiwa, objek, dan segala tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang terjadi. Data penelitian dokumentasi berbentuk foto, data-data visi-misi sekolah, audio rekaman, dan data terkait implementasi manajemen di SDIT Bina Insani Mesuji.

3.6. Teknik Analisis Data

Implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar di SDIT Bina Insani, analisis data dilakukan sebelum peneliti memulai penelitian, selama proses pengumpulan data, dan setelah proses pengumpulan data selesai.

Pengumpulan data dan analisis data pada penelitian kualitatif. Hal ini berarti bahwa data yang telah dikumpulkan secara bersamaan digunakan untuk menulis, mengubah, mengurangi, dan menampilkan hasil dari observasi dan wawancara. Menurut Moleong (2017), analisis data dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sementara, menurut Sugiyono (2021:320), menyatakan bahwa proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun dan memilih yang penting sehingga mudah dipahami oleh semua orang. Analisis data dilakukan setelah mendapatkan seluruh data dari sumber dengan berbagai teknik yang dilakukan hingga mendapatkan data yang jenuh. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari model analisis interaktif oleh Milles dan Huberman seperti berikut ini.



Gambar 2. Model Analisis Interaktif

Sumber : Milles dan Huberman dalam Sugiyono, (2020: 322).

Berdasarkan alur tersebut maka proses analisis data meliputi:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah upaya strategis dalam mengumpulkan data penelitian dari informan secara langsung, maupun dari dokumen atau arsip untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangkaian mencapai tujuan penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Kemudian setelah data terkumpul tahap selanjutnya yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta transformasi data mentah yang didapat dari sumber data melalui teknik pengumpulan data, sehingga hal yang tidak berkenaan dengan fokus penelitian dihilangkan sehingga pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data adalah penyusunan sekumpulan informasi hal ini dilakukan agar data dapat tersusun dalam pola hubungan, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Penyajian data bisa berbentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, flowchart dan sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion/Verification*)

Setelah dilakukan penyajian data, maka tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara

dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti- bukti kuat yang mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Data yang sebelumnya telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti harus didukung oleh bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan kredibel. Penarikan kesimpulan berdasarkan fokus penelitian.

3.7. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya, data yang dikumpulkan selama penelitian harus dicek kembali. Setelah menggunakan metode keabsahan data, peneliti dapat memiliki kepercayaan diri untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian mereka. Menurut Sugiyono (2021:364) membagi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) yang dapat diperinci sebagai berikut:

3.7.1. Uji Credibility (validitas internal)

Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan peneliti agar hasil tidak meragukan. Pada penelitian ini, tiga teknik uji digunakan: triangulasi, *member check*, dan peningkatan ketekunan penelitian untuk menguji kredibilitas (validitas internal).

3.7.1.1. Triangulasi

Pengujian kredibilitas ini melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai teknik. Ada dua jenis triangulasi yang digunakan dalam pengujian kredibilitas ini. Triangulasi sumber melibatkan pengecekan data dari sumber lain, seperti kepala sekolah dan tenaga pendidik. Triangulasi teknik melibatkan pengecekan data dari sumber yang sama dengan berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, atau dokumentasi.

3.7.1.2. Member check

Untuk menjamin keabsahan penelitian, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan yang diberikan sumbernya. Peneliti mengecek sumber data untuk memastikan bahwa data tersebut benar dan valid. Pada tahap akhir

kegiatan penelitian lapangan, peneliti memeriksa subjek penelitian dengan *member check* untuk memastikan bahwa datanya akurat. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang ditemukan penulis disepakati oleh pemberi data, itu berarti data tersebut valid dan membuatnya lebih kredibel dan dipercaya. Namun, jika pemberi data tidak setuju dengan peneliti dengan berbagai penafsirannya, maka peneliti melakukan diskusi dengan pemberi data dan jika ada perbedaan yang signifikan, maka peneliti harus mengubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

3.7.1.3. Peningkatan Ketekunan Penelitian

Meningkatkan ketekunan berarti pengamatan dilakukan lebih sering dan dengan lebih cermat. Melalui cara ini, kepastian data dan urutan peristiwa dapat disusun secara sistematis dan pasti. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, dan dokumentasi yang terkait dengan temuan penelitian. Hal ini dilakukan agar wawasan peneliti semakin luas dan tajam sehingga dapat memeriksa kebenaran data yang ditemukan. Peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak sehingga dapat meningkatkan kredibilitas data.

3.7.2. Uji *Transferability* (validitas eksternal)

Menunjukkan seberapa tepat atau relevan hasil penelitian dengan populasi sampel. *Transferability* berkaitan dengan pertanyaan tentang apakah hasil penelitian dapat digunakan atau diterapkan dalam situasi lain. Laporan penelitian harus disusun dengan rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya, sehingga pembaca dapat memahami dan memutuskan apakah penelitian ini layak atau tidak untuk digunakan di tempat lain.

3.7.3. Uji *Dependability* (reliabilitas)

Dependability disebut sebagai reliabilitas. Suatu penelitian dapat dikatakan *reliabel* apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Untuk mengaudit dan menghasilkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, penelitian kualitatif memerlukan data langsung dari

lapangan atau tempat penelitian. Jika orang lain dapat mengulangi atau merefleksi proses penelitian, maka penelitian tersebut *reliabel*. Namun, jika peneliti tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangan, maka penelitian tersebut dapat diragukan.

3.7.4. Uji *Confirmability* (objektivitas)

Penelitian dikatakan objektif jika hasilnya disetujui oleh banyak orang. Peneliti akan menguji hasil penelitian mulai dari proses sampai mendapatkan datanya. Jika penelitian tidak melibatkan proses tetapi menghasilkan data, maka penelitian tersebut tidak dapat dipercaya. Namun, jika hasil penelitian adalah hasil dari proses penelitian, maka penelitian tersebut memenuhi standar konfirmasi. Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga dapat dilakukan secara bersamaan.

3.8. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitian ini dilaksanakan secara 4 tahap, meliputi:

3.8.1. Tahap Pra Lapangan

Penelitian diawali dengan tahap pra lapangan yang dilaksanakan pada 7 November 2023 dengan mempertimbangkan etika penelitian. Tahap pra lapangan yang dilaksanakan sebagai berikut.

- a) Menyusun rencana penelitian.
- b) Memahami sub fokus dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti.
- c) Menentukan tempat penelitian yaitu memilih SDIT Bina Insani sebagai tempat penelitian
- d) Menyelesaikan perizinan formal, meminta surat penelitian pendahuluan dari fakultas lalu menyerahkan surat tersebut kepada SDIT Bina Insani yang sebelumnya sudah memohon izin kepada kepala sekolah untuk dapat melakukan penelitian pendahuluan di sekolah tersebut.
- e) Memilih informan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian yang akan dilakukan.
- f) Menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian.

3.8.2. Tahap Lapangan

Tahap kedua adalah tahap lapangan, pada tahap ini dilakukan observasi dan terjun langsung ke tempat penelitian guna mengetahui keadaan sekolah dengan memahami latar penelitian dan meminta izin kepada pihak sekolah untuk dilakukan penelitian sesuai judul yang diajukan serta mempersiapkan diri dan alat pengumpul data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

3.8.3. Tahap Analisis Data

Tahap ketiga adalah tahap analisis data, setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan maka dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari informan sesuai sub fokus penelitian yang telah dirancang hingga menginterpretasikan data yang telah diperoleh. Analisis data akan dilakukan dengan model analisis interaktif sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

3.8.4. Tahap Pelaporan

Tahap akhir setelah yang dilakukan setelah menganalisis data yaitu pelaporan. Hasil dari analisis dilaporkan dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis dan rinci agar dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan bagi pembacanya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kurikulum merdeka belajar di SDIT Bina Insani masih dilakukan secara bertahap, hal ini berakibat pada proses implementasi manajemen kurikulum merdeka karena adanya perbedaan dalam menerima perubahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar di SDIT Bina Insani dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar di SDIT Bina Insani terdiri dari :

1. Perencanaan (*Planning*), proses perencanaan kurikulum SDIT Bina Insani di ikuti oleh berbagai pihak. Perencanaan ini mencakup pembuatan dan penentuan tujuan sekolah, pembuatan kegiatan dan program, pembuatan anggaran, dan penyediaan sarana dan prasarana. Selain itu, perencanaan didasarkan arahan dari kemendikbudristek, yayasan, dinas setempat, termasuk tujuan pembelajaran pemerintah yang disesuaikan dengan kekhasan, tujuan sekolah, serta hasil dari analisis dan evaluasi yang digunakan sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), pengorganisasian kurikulum merdeka di SDIT Bina Insani yakni Kepala sekolah bertanggung jawab atas penerapan kurikulum merdeka di SDIT Bina Insani. Kepala sekolah membentuk koordinator pelaksana program kurikulum merdeka, membuat dan membagikan tugas yang melibatkan seluruh personil, membuat deskripsi tugas personil, memberikan pengawasan kepada personil, menentukan prosedur pembelajaran, dan mengarahkan personil dengan memberikan

arahan dan mengkoordinasikan pembelajaran. Personil membantu kepala sekolah dalam merancang program, melaksanakan program kegiatan, dan memastikan program berjalan dengan baik.

3. Pelaksanaan (*Actuating*), pelaksanaan kurikulum merdeka di SDIT Bina Insani sudah berjalan selama dua tahun ini sehingga implementasi kurikulum merdeka sudah diterapkan pada kelas 1, 2, 4, dan 5. Pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler kurikulum merdeka di SDIT Bina Insani sudah berfokus pada peserta didik yang bermuara pada profil pelajar pancasila.
4. Pengawasan (*Controlling*), proses pengawasan implementasi kurikulum merdeka SDIT Bina Insani yakni kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi secara teratur dengan melihat secara langsung keadaan kelas dan memeriksa administrasi pembelajaran pendidik yang terdiri dari CP, ATP, modul ajar dan modul P5, selain itu kepala sekolah juga mengarahkan, membimbing, mengawasi kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, mendiskusikan permasalahan, memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada pendidik maupun peserta didik.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mengajukan saran sebagai berikut.

- a. Kepala sekolah
Kepala sekolah diharapkan selalu memberikan dukungan penuh serta mengupayakan peningkatan pemahaman orang tua, pendidik serta masyarakat terhadap pelaksanaan program kurikulum merdeka, sehingga peserta didik dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik.
- b. Pendidik
Diharapkan lebih memfasilitasi setiap peserta didik sehingga peserta didik dapat mengeksplor minat bakatnya dan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pemahaman terkait kurikulum merdeka guna menambah kualitas kompetensi pendidik karena sebagai sekolah penggerak dan sekolah dasar swasta pertama yang

menerapkan kurikulum merdeka di Kabupaten Mesuji, diharapkan dapat menjadi contoh bagi sekolah dasar lain dalam hal manajemen kurikulum merdeka di Kabupaten Mesuji.

c. Peneliti selanjutnya

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menemukan implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar dengan menggunakan metode penelitian lain misalnya kuantitatif, teori fungsi manajemen selain yang digunakan oleh peneliti atau dengan analisis data yang menggunakan aplikasi NVIVO.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Agistia, N. A., Danugiri, D., & Hidayat, D. (2021). Implementasi Manajemen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 114-127.
- Aida, E. S. P. (2023). *Implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar di sdit sabilul huda kota cirebon* (Doctoral dissertation, S1-Manajemen Pendidikan Islam IAIN SYEKH NURJATI CIREBON).
- Ainia, D. K. (2020). “Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter.” *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101.
- Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*, 4(02), 67-75.
- Al-Kansa, Bunga., Mila L., & Husen W. (2021). *Revitalizing The Elementary School's Management Of Curriculum And Learning During The Pandemic Era. Indonesian Journal Of Multifidiplinary Science*. 1 (3). 193-200.
- Amrina, H., & Maryono, M. (2019). Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Di MTS Ar Risalah Kepil. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 75-87.
- Angga, Suryana, C., Nurwahidah, I., Herry Hernawan, A., & Prihantini. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 da Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6 Nomor 4, 5877–5889.
- Arifin, Z. (2012). *Konsep dan model pengembangan kurikulum: konsep, teori, prinsip, prosedur, komponen, pendekatan, model, evaluasi dan inovasi*.
- Bahar, H., & Sundi, V. H. (2020). Merdeka Belajar untuk Kembalikan Pendidikan pada Khittahnya. *PROSIDING SAMASTA*.
- Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC terhadap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. *Warta Dharmawangsa*, (50).
- Daulay, M. I., & Fauziddin, M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Jenjang PAUD. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 9(2), 101-116.

- Donnelly, R., & Patrinos, H. A. (2021). Learning loss during Covid-19: An early systematic review. *Prospects*, 1–9.
- Efendi, E., Tillah, M., Alwi, H., Ardha, N., & Izzaty, M. (2023). Urgensi Manajemen Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Macsilex*, 2(1), 44-51.
- Fathurrochman, I. (2017) 'Implementasi Manajemen Kurikulum Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Santri Pondok Pesantren Hidayatullah/Panti Asuhan Anak Soleh Curup', *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(1), p. 85.
- Fitrah dan Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak, Jawa Barat.
- George R. Terry, L. W. R. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Goffar, A. (2016). Manajemen dalam Islam (perspektif al-Qur'an dan hadits). *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(1), 35-58.
- Hartono, M. I., Azisah, S., & Chalik, S. A. (2023). Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Di Sd Negeri 2 Kampung Baru Kabupaten Majene. *Nazzama Jurnal Pendidikan Manajemen*, 3(1), 25-38.
- Hasim, E. (2020). Penerapan kurikulum merdeka belajar perguruan tinggi di masa pandemi covid-19. *E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*.
- Hoch, C. (2011). *The planning research agenda. planning theory for practice*. *TPR*, 82 (2) . 8.
- Indriyani, I., & Jannah, R. (2023). *Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka: Preparation for the Implementation of the Independent Curriculum*. *PROSPEK*, 2(2), 98-103.
- Intan, N., Wijaya, S., Satriyadi, S., Siahaan, A., & Nasution, I. (2023). Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(02).
- Jayanti, M. (2023). *Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar Studi Kasus SMP Trimurjo*. (Tesis) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
- Kemendikbud (2023) *Latar Belakang Kurikulum Merdeka – Merdeka Mengajar*, Kemdikbud.go.id.
- Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2022). *Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 025/H/KR/2022 Tentang Satuan Pendidikan*

Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023 Tahap 1.

- Kompri. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Bandung, Alfabeta.
- Maulidia, M., Shufiatuddin, S. R. A., Damastuti, R., Al Istiqomah, S., Haq, R. R., & Sholeh, L. (2023). Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Melayu SP. Hasibuan. 1993. *Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah)*. Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, R. (2019). Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Rabwah*, 13(01), 27-44.
- Muji, A. P., Gistituati, N., Bentri, A. & Falma, F. O. (2021). Evaluation of the Implementation of the Sekolah Penggerak Curriculum Using the Context, Input, Process and Product Evaluation Model in High Schools. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 7(3), 377- 384.
- Mulyono, R. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Mempersiapkan Pembelajaran Abad 21. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(2), 1348-1363.
- Nasution, S. L., Ningsih, E. I. K., & Neliwati, N. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(4), 862-872.
- Nelisma, Y. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Perpektif Manajemen Pendidikan Islam. *Al-Fahim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 158-172.
- Nidawati. (2021). Hakikat Kurikulum Pendidikan Nidawati. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(1), 22–42.
- Ningsih. (2020). *Peran Literasi Digital dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Tenaga Kependidikan di Madrasah Aliyah Nurul Iman Ulu Gedong Seberang Kota Jambi*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan, Dan Tenaga Pendidikan (Literatur Manajemen Pendidikan Islam). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 451-464.
- Pora, Y. (2007). *Selamat Tinggal Sekolah*. Yogyakarta: Media Pressindo

- Putri, Fitria & Honest Ummi. (2022). *The Principal's Leadership Role in Implementation of the Independent Curriculum in Elementary School*. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 6 (2), 680-688.
- Rachmawati, N., Marini, A., Nafiah, M., & Nurasiah, I. (2022). *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Impelementasi Kurikulum Prototipe di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar*. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3613–3625.
- Rahayu, R., Rosita, R., Sri Rahayuningsih, Y., Herry Hernawan, A., & Prihahantini. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Penggerak*. *Jurnal Basicedu*, 6, 6313–6319.
- Rahmawati, A. N. (2018). *Identifikasi masalah yang dihadapi guru dalam penerapan kurikulum 2013 revisi di SD*. *Indonesian Journal of Primary Education*, 2(1), 114-123.
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). *Potret kurikulum merdeka, wujud merdeka belajar di sekolah dasar*. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174-7187.
- Rendika Vhalery, Albertus Maria Setyastanto, dan Ari Wahyu Leksono, 'Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur', *Research and Development Journal of Education*, 8.1 (2022).
- Rita, S., Sumarni, A., Fuad Rinaldi, Marpuah, Miftahussalam, & M Firman, S. (2023). *Manajemen Kurikulum Berbasis Penilaian Berdasarkan Kurikulum Merdeka Berbagi*. Adanu Abimata, Indramayu.
- Ritonga, N. A. (2017). *Ayat-ayat tentang manajemen kurikulum pendidikan islam*. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1).
- Rosanti, E. (2021). *Analisis Pelaksanaan Pembelajaran dalam Jaringan pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Guru Sekolah Dasar*. (Skripsi) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
- Saajidah, L. (2018). *Fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan kurikulum*. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 3(2), 201-208.
- Sagala. (2010). *Konsep dan makna pembelajaran*. Alfabeta. Bandung.
- Salim dan Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana, Jakarta.
- Santoso, G., Damayanti, A., Imawati, S., & Asbari, M. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Literasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 84-90.
- Sholihah, Qomariyatus.(2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Universitas Brawijaya Press, Malang.

- Sibagariang, D., Sihotang, H., & Murniarti, E. (2021). Peran guru penggerak dalam pendidikan merdeka belajar di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88–99.
- Standar, K. K. B. *Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 033. H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka.*
- Sucitra, D. A. (2021). *Analisis Evaluasi Pembelajaran Daring Berbasis Berpikir Kritis Studi Lapangan di Sd Al Kautsar Bandar Lampung.* (Skripsi) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta, Bandung.
- Sulfemi, W. B. (2019). *Manajemen kurikulum di sekolah.*
- Sulfemi, W.B. (2018) ‘*Manajemen Kurikulum di Sekolah*, STKIP Muhammadiyah Bogor, p. 3.
- Sumanti, S. T., Ayyun, K. Q., Indriyani, R., Giva Rizki, C., & Juwita, M. (2022). Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan Menerapkan Protokol Kesehatan di Desa Bangun Rejo. *Heartly*, 10(1), 23–31.
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248-8258.
- Suryaman, M. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 13–28.
- Syafi’i, F. F. (2021). Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar, 46–47.
- Terry, G. R. 1986. *Asas-Asas Manajemen.* Alumni. Bandung.
- Tuala, R. P. (2018). Manajemen Sekolah Islam Terpadu Dalam Pembentukan Karakter Bangsa Yang Pancasila Di Sdit Muhammadiyah Gunung Terang Dan Sdit Permata Bunda Iii Sukabumi Bandar Lampung. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 413-434.
- Uliatunida, N. (2020). Perencanaan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. *Medikom/ Jurnal Ilmu Pendidikan dan Dakwah*, 2(1), 35-48.
- Ulinniam, Hidayat, Barlian, U. C., & Iriantara, Y. (2021). Penerapan Kurikulum Revisi 2013 Di Masa Pandemi Pada SMK IBS Tathmainul Qullub Indramayu. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(1), 118–126.
- Umar Sidiq, *Manajemen Madrasah, Why We Need the Journal of Interactive Advertising*, 2004, X. Hlm 15.

- Usman, H. (2022). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*. Bumi Aksara.
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum merdeka belajar kampus merdeka: Sebuah kajian literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185-201.
- Wijaya, A., Mustofa, M. S. & Husain, F. (2020). Socialization of the Independent Learning Program and Motivating Teachers for Middle School 2 Teachers in Maros Regency. *Puruhita Journal*, 2(1), 46-50
- Yunus, M. A., Luneto, B., & Anwar, H. (2021). Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Kurikulum (Studi Manajemen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar). *Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 17-26.
- Zahir, A., Nasser, R., Supriadi, S., & Jusrianto, J. (2022). Implementasi kurikulum merdeka jenjang SD kabupaten Luwu Timur. *Jurnal IPMAS*, 2(2), 55-62.